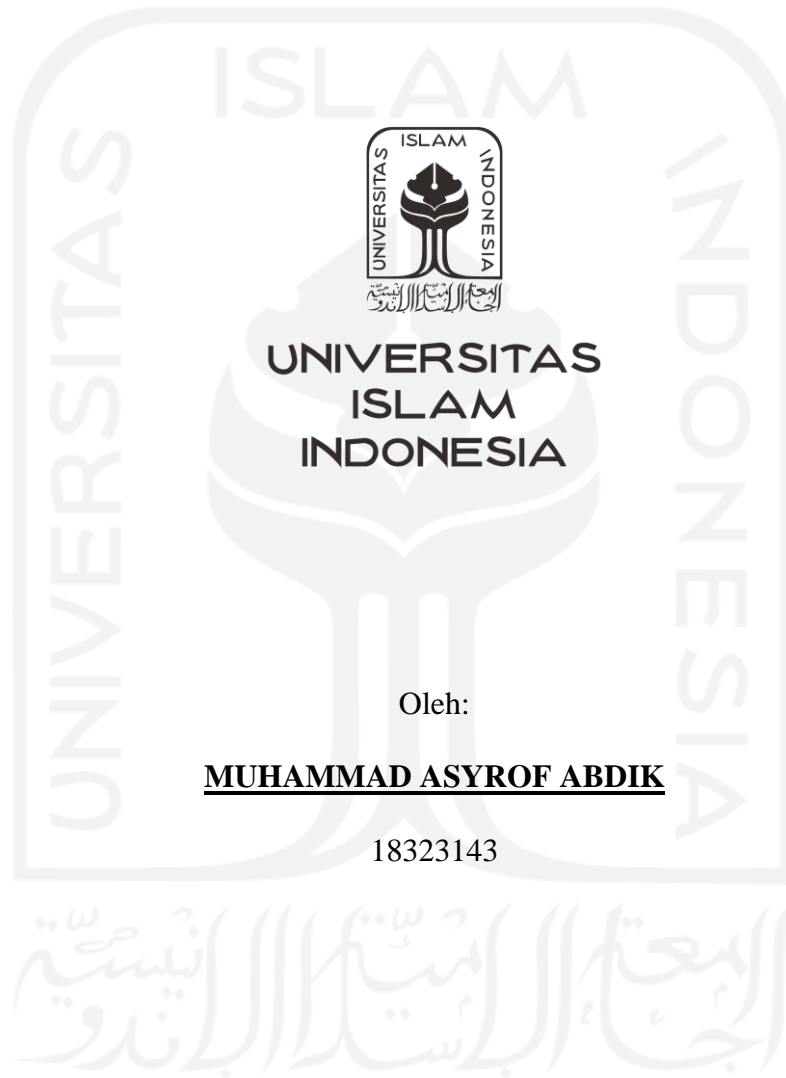


**ANALISIS FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ‘ULAMA DALAM  
KONFLIK SUKU DI AFGHANISTAN**

**(2014-2019)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD ASYROF ABDIK**

18323143

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**ANALISIS FAITH-BASED DIPLOMACY NAHDLATUL ‘ULAMA DALAM  
KONFLIK SUKU DI AFGHANISTAN**

**(2014-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**MUHAMMAD ASYROF ABDIK**

18323143

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

***Analisis Faith-Based Diplomacy Nahdlatul ‘Ulama Dalam Konflik Suku Di  
Afghanistan  
(2014-2019)***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

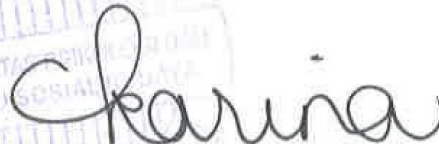
Pada Tanggal

12 Desember 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

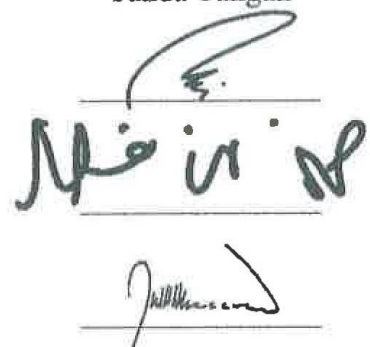


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Senin, 12 Desember 2022*



---

*Muhammad Asyrof Abdik*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR</b>	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	vii
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>ABSTRACT</b>	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	5
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	5
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	14
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	17
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	19
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	19
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	19
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	19
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	20
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	20
<b>BAB 2 NAHDLATUL ‘ULAMA DALAM FAITH-BASED DIPLOMACY GLOBAL</b>	22

<b>2.1. Nahdlatul ‘Ulama Sebagai Aktor <i>Faith-Based Diplomacy</i></b>	23
2.1.1 <i>Konsep Pemikiran NU Dalam Konteks Perdamaian Global</i>	25
2.1.2 <i>Visi baru Nahdlatul ‘Ulama</i>	28
<b>2.2. Peran Nahdlatul ‘Ulama Dalam <i>Faith-Based Diplomacy</i> Global</b>	31
<b>2.3. Dinamika Konflik Suku di Afghanistan</b>	34
<b>BAB 3 PERAN NAHDLATUL ‘ULAMA DALAM KONFLIK SUKU DI AFGHANISTAN: ANALISIS FAITH-BASED DIPLOMACY</b>	41
<b>3.1. Histori Kerjasama Nahdlatul ‘Ulama Indonesia – Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan</b>	42
3.1.1 <i>Berdirinya Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan tahun 2014</i>	47
3.1.2 <i>AWPFO (Afghanistan Women’s Peace and Freedom Organization) 2015</i>	51
3.1.3 <i>Dialog lanjutan Nahdlatul ‘Ulama dan Taliban Jakarta 2018</i>	53
3.1.4 <i>Dinamika perkembangan Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan 2019</i>	59
<b>3.2. <i>Faith-Based diplomacy</i> Nahdlatul ‘Ulama di Afghanistan</b>	64
3.2.1 <i>A New Vision</i>	65
3.2.2 <i>Building Bridges</i>	67
3.2.3 <i>Healing Conflict</i>	68
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	71
<b>4.1. Kesimpulan</b>	71
<b>4.2. Rekomendasi</b>	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	75
Bibliography	75

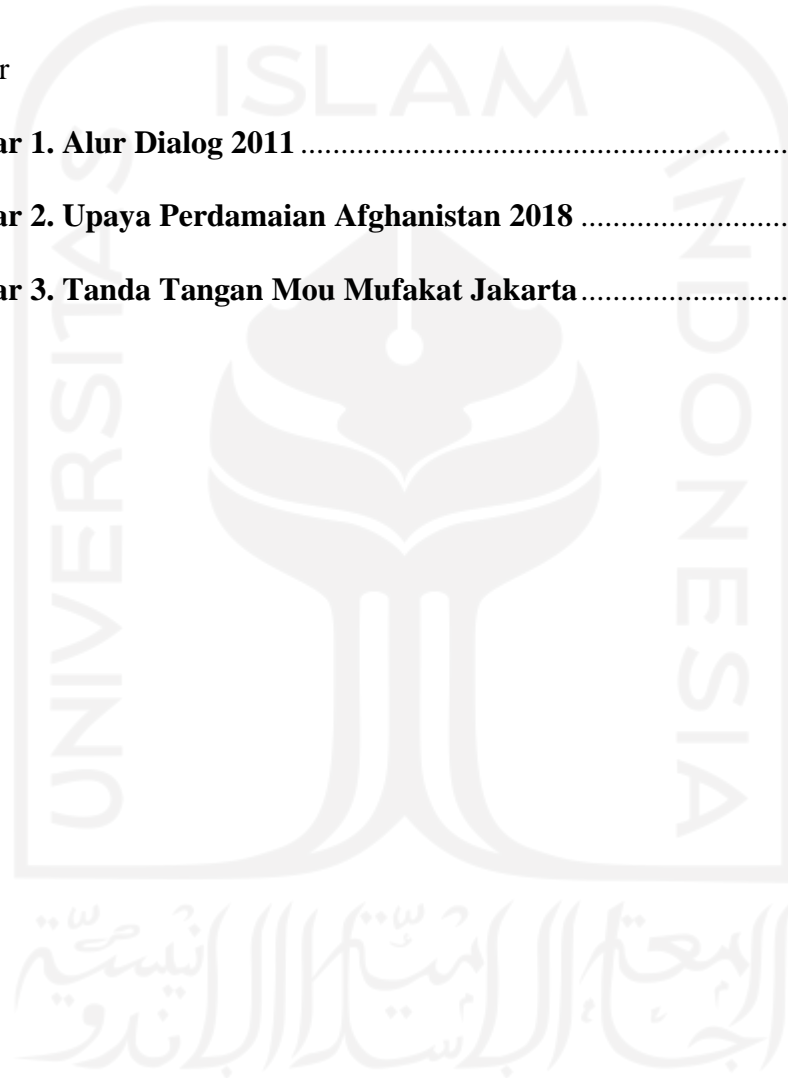
## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

### Tabel

<b>Tabel 1. Delegasi Forum Pembentukan NUA 2014 .....</b>	<b>48</b>
---	-----------

### Gambar

<b>Gambar 1. Alur Dialog 2011 .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 2. Upaya Perdamaian Afghanistan 2018 .....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 3. Tanda Tangan Mou Mufakat Jakarta .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR SINGKATAN

NU	: Nahdlatul ‘Ulama
NUA	: Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdlatul ‘Ulama
NGO	: Non-Governmental Organization
NECDO	: Noor Educational and Capacity Development Organization
KNAHR	: Karama Network of Advocacy and Human Rights
WTC	: World Trade Center
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
ICIS	: International Confrence of Islamic Scholars
ISOMIL	: International Summit of the Moderrate Islamic Leader
PDPA	: People Democratic Party of Afghanistan
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
AWPFO	: Afghanistan Women’s Peace and Freedom Organization



## ABSTRAK

Konflik suku di Afghanistan telah berlangsung selama beberapa dekade, hingga Uni Soviet mundur dari Afghanistan, perang suku di Afghanistan masih berlanjut. Konflik suku di Afghanistan kembali menguat ketika Presiden Amerika Serikat George W. Bush melepaskan serangan rudal yang pertama pada bulan Oktober 2001. Dalam kondisi seperti ini, bantuan dari pihak eksternal sangat diperlukan untuk mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Nahdlatul ‘Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di dunia, NU telah berdiri sejak tahun 1926, selama dasawarsa 2000-an NU aktif menyelenggarakan berbagai konferensi internasional dengan mengampanyekan perdamaian yang terkandung di dalam nilai Islam *Rahmatan lil ‘alamin*, dan bertumpu pada prinsip *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i’tidal*. Melalui sikap moderat NU dalam menghadapi isu-isu keagamaan, membuat para ulama Afghanistan tertarik untuk “berkonsultasi” dalam persoalan konflik berkepanjangan yang terjadi pada negaranya. NU fokus terhadap pendekatan sosial keagamaan tanpa kepentingan politik, analisa penggunaan konsep *Faith-Based Diplomacy* berhasil NU terapkan di Afghanistan sehingga kehadiran NU diterima sangat positif. Dibuktikan dengan penyatuan visi, mengadakan pertemuan berkelanjutan, membangun jembatan dalam penyampaian aspirasi kelompok untuk perdamaian, pemulihan konflik sebagai langkah mediasi konflik, dan berhasil mendirikan Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan di tahun 2014 dan terus berkembang di 22 Provinsi hingga tahun 2019.

**Kata Kunci** : Afghanistan, Nahdlatul ‘Ulama, Konflik, Perdamaian, *Faith-Based Diplomacy*.

## ABSTRACT

*The tribal conflict in Afghanistan has been going on for decades until the Soviet Union withdrew from Afghanistan, and the tribal war in Afghanistan continues. Tribal conflict in Afghanistan strengthened again when US President George W. Bush launched his first missile attack in October 2001. Under these conditions, assistance from external parties is urgently needed to strive for peace in Afghanistan. Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in the world, NU was established in 1926. During the 2000s, NU actively organized various international conferences by campaigning for peace contained in the Islamic values Rahmatan Lil 'Alamin and based on the principle of tasamuh, tawazun, tawassuth, and i'tidal. NU's moderate attitude in dealing with religious issues made Afghanistan clerics interested in "consulting" on the prolonged conflict in their country. NU focuses on a socio-religious approach without political interests. This thesis uses the concept of Faith-Based Diplomacy, successfully implemented by NU in Afghanistan, so NU's presence is received very positively. Evidenced by the unification of visions, holding ongoing meetings, building bridges in conveying group aspirations for peace, conflict recovery as a conflict mediation measure, and successfully establishing Nahdlatul Ulama Afghanistan in 2014 and continuing to grow in 22 Provinces until 2019.*

**KeyWords** : *Afghanistan, Nahdlatul 'Ulama, Conflict, Peace, Faith-Based Diplomacy.*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik suku di Afghanistan sudah berlangsung semenjak hampir tiga dekade yang lalu lamanya. Perang saudara di sana terus berlanjut ketika Uni Soviet mundur dari Afghanistan pada 20 Juli 1987 (Ewans 2002). Kala itu, Rezim-rezim yang berkuasa di Afghanistan setiap waktunya disibukkan dengan sejumlah pemberontakan. Dalam catatan sejarah perang saudara atau konflik antar suku di Afghanistan terjadi mulai 1989-1992 (Ewans 2002).

Keadaan geografis Afghanistan berupa pegunungan dan gurun pasir dapat mencerminkan komposisi etnis, budaya, dan bahasa. Walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam tapi populasinya terbagi menjadi beberapa kelompok etnis, yang terbesar adalah etnis Pashtun, disusul dengan Tajik, Hazara, Aimak, Uzbek, Turkmen, dan kelompok kecil lainnya. Namun, mereka tidak menjadikan itu sebagai kekayaan justru dijadikan ajang untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan siapa yang pantas untuk berkuasa atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, contoh saja perang antara etnis Tajik dan Uzbek di Afghanistan Utara dengan etnis Pashtun yang mayoritas mendiami kawasan Afghanistan Selatan. Warga Afghanistan berkonflik karena ideologi politik dan faktor intervensi atau campur tangan negara lain. Imbasnya warga Afghanistan melupakan bahwa mereka adalah satu agama, satu rumpun, satu dan sebaiknya dapat menjadi landasan membangun rasa nasionalisme (Jordan 2011).

Afghanistan meski gagal memperoleh bantuan, wilayah, atau pengakuan internasional, Rezim Najibullah tetap berkuasa hingga tahun 1992. Sebenarnya keamanan di Afghanistan sudah semakin buruk sejak terjadi konflik politik setelah Uni Soviet berkemas dari negara Afghanistan. Di tahun yang sama 1992, Presiden Najibullah dibunuh oleh kelompok Taliban yang pada saat itu mereka adalah oposisi pemerintahan yang menganggap rezim Najibullah adalah “boneka” soviet, pada tahun 1996 terjadi pertempuran sengit yang akhirnya menjadikan Taliban sebagai penakluk ibukota Afghanistan (Barak 2020), faktor tersebut menjadi salah satu awal penyebab konflik suku di Afghanistan semakin mencuat.

Konflik suku di Afghanistan kembali diguncang, konflik di Afghanistan kembali menguat ketika Presiden Amerika Serikat George W Bush melepaskan serangan rudal yang pertama pada bulan Oktober 2001, pesawat-pesawat tempur seri B-1, B-2, B-3, dan B-52 diluncurkan untuk melakukan penyerangan melalui udara. Kemudian rudal juga diluncurkan melalui kapal-kapal Amerika Serikat, hal ini juga terjadi atas akibat kasus WTC (*World Trade Center*) yang melibatkan Osama bin Laden yang saat itu bermukim di Afghanistan dan dilindungi oleh Taliban, karena Taliban meyakini bahwa terduga tidak terlibat dalam kasus WTC (Dina Susanti 2005). Kejadian tersebut adalah buntut dari peristiwa 9/11 dimana kelompok yang diduga dipimpin oleh Osama bin Laden melakukan pengeboman dan penyerangan gedung WTC, hal ini terjadi karena Amerika Serikat mendukung Israel dalam penindasan kepada Palestina. Sedangkan tujuan serangan balik Amerika Serikat adalah untuk menghancurkan kelompok AL-Qaeda yang selanjutnya menggulingkan pemerintahan Taliban yang melindungi mereka (Widyaningrum 2018). Tujuh belas tahun berlalu setelah kejadian tersebut

kelompok Taliban menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan mereka mulai memerangi pemerintahan Afghanistan yang didukung pasukan Amerika Serikat (Wijaya 2018).

Nahdlatul 'Ulama adalah organisasi keagamaan yang berdiri pada tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asyari atas segala pertimbangan dan perjuangan yang panjang, NU berdiri atas respon dari berbagai problem keagamaan, seperti peneguhan mazhab, juga alasan-alasan kebangsaan dan kehidupan sosial-masyarakat. Sebelum lahirnya NU sudah ada organisasi bernama *Nahdlatul Wathan* atau kebangkitan tanah air yang saat itu diketuai oleh KH. Wahab Chasbullah pada 1916, namun bentuknya tidak formal bisa dikatakan wadah kyai-kyai pesantren saat itu (Ahmad 2020).

NU pada saat itu lahir atas kebutuhan umat Islam seluruh dunia, karena terdengar kabar bahwa Dinasti Saud di Arab Saudi merencanakan pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi pusat ziarah seluruh Muslim di dunia yang dianggap bid'ah dalam mazhab mereka. Dari sekian banyak pertimbangan, isu tersebut adalah salah satu respon ulama nusantara untuk kemudian mendirikan NU sebagai organisasi formal guna menghadapi problem keagamaan sampai "kebhinekaan", selanjutnya NU membentuk sebuah kepanitiaan kecil bernama Komite Hijaz yang nantinya dikirim atas nama organisasi formal ke Arab Saudi untuk menemui Raja Ibnu Saud kemudian mengajukan beberapa permohonan salah satunya terkait isu tersebut (Anam 2010). Maka pada saat itu diresmikanlah Nahdlatul 'Ulama tepat tanggal 31 Januari 1926.

Melalui sikap moderat NU dalam menghadapi isu-isu keagamaan, membuat para ulama Afghanistan tertarik untuk "berkonsultasi" dalam persoalan konflik

berkepanjangan yang terjadi pada negaranya. Upaya pertama NU dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan, dilaksanakan melalui pembentukan sebuah forum dialog. Forum tersebut dilakukan pada 18 Juli 2011, dengan tajuk “Forum Konsultasi untuk Perdamaian di Afghanistan”. Forum ini dihadiri oleh dua puluh tokoh masyarakat dan agama dari Afghanistan yang sangat berpengaruh. Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dan pertukaran informasi tentang ide atau solusi alternatif seperti apa untuk menciptakan perdamaian di tengah masyarakat Afghanistan. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga beberapa kali pertemuan serta kunjungan dari pihak PBNU maupun Afghanistan termasuk ketika para ulama lokal Afghanistan menghadap ke kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) di tahun 2013 pada bulan September, mereka memandang gerakan yang dilakukan oleh NU di Indonesia dalam mewujudkan perdamaian sangat tepat, juga terinspirasi langkah NU dalam merajut keberagaman Indonesia sekaligus merawatnya, hingga kepeduliannya dalam isu internasional. PBNU menerima baik kunjungan ulama Afghanistan dan mereka mendorong langkah diplomasi melalui konsep *Faith-Based diplomacy* NU. Dari beberapa kunjungan yang dilakukan, setahun mendatang tepat pada Juni 2014 mereka resmi membentuk Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan (NUA), dalam data hingga 2019 NUA sudah membuka cabang di 22 dari 34 provinsi di seluruh penjuru Afghanistan dan menargetkan akan tersebar ke seluruh provinsi dengan mendapat dukungan dari ribuan ulama NUA semakin percaya diri. Melalui konsep pemikiran NU, berharap langkah *Faith-Based diplomacy* dengan pendekatan toleransi, bersikap moderat, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan anti terhadap radikalisme hingga kekerasan diharapkan dapat menyudahi konflik suku di Afghanistan yang berkepanjangan tersebut.

Melalui gerakan *people-to-people* NUA terus membuktikan bahwa konflik bisa diredam jika alat peredamnya sesuai dengan situasi yang terjadi (Fathoni 2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana konsep *Faith-Based diplomacy* yang dilakukan Nahdlatul ‘Ulama dalam proses perdamaian konflik suku di Afghanistan pada 2014-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perspektif dan kontribusi Nahdlatul ‘Ulama dalam proses perdamaian berdasarkan nilai keIslaman yang dianutnya.
2. Untuk mengetahui konsep *Faith-Based diplomacy* Nahdlatul ‘Ulama dalam membantu proses perdamaian konflik suku di Afghanistan 2014-2019.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis memberikan batasan waktu antara tahun 2014 hingga 2019. Sebenarnya, forum dialog antara NU – Ulama Afghanistan mulai terjalin pada tahun 2011 yang dihadiri oleh 20 tokoh masyarakat dan agama dari Afghanistan, kembali membangun hubungan ketika ulama lokal Afghanistan mengunjungi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) pada bulan September 2013 setelah sebelumnya perwakilan dari Nahdlatul ‘Ulama

bertandang ke ibukota Afghanistan pada Juni 2013, selanjutnya baru di tahun 2014 Ulama Afghanistan resmi mendirikan Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan (NUA). Ulama lokal Afghanistan memandang gerakan yang dilakukan oleh NU di Indonesia dalam mewujudkan perdamaian sangat tepat, terinspirasi langkah NU dalam merajut keberagaman Indonesia sekaligus merawatnya, hingga dalam ranah internasional. PBNU menerima baik kunjungan ulama Afghanistan dan mereka mendorong langkah diplomasi melalui konsep *Faith-Based diplomacy* ala Nahdlatul ‘Ulama melalui pendekatan toleransi, bersikap moderat, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan anti terhadap radikalisme dan kekerasan hingga mewujudkan penerimaan kehidupan dengan segala aspeknya, keterlibatan semua pihak dalam perumusan solusi, penyelesaian konflik secara damai individu maupun kelompok, kembali memulihkan hubungan yang sehat, dan keadilan sosial sebagai kekuatan hubungan antar manusia (Monge 2003).

2014-2017 kerjasama ini sempat terhenti karena peralihan rezim Indonesia, dengan segala dinamika kedua belah pihak akhirnya pada tahun 2018 dilakukan dialog penguatan dengan pimpinan Taliban di Jakarta dan menghasilkan penandatanganan mufakat Jakarta pada tanggal 22 September 2018, komponen tersebut diharapkan dapat menyudahi konflik suku di Afghanistan yang berkepanjangan tersebut. Karena dalam agama Islam sendiri inti substansinya terdapat pada dua poin penting yaitu kemanusiaan dan perdamaian dalam hal ini adalah Islam sebagai pemegang prinsip *Rahmatan lil ‘alamin*, yaitu rahmat bagi seluruh alam tanpa memandang siapa dan apa. Pentingnya penelitian ini, karena belum ada yang membahas secara fokus terhadap apa yang akan terjadi pada konflik suku di Afghanistan setelah berdirinya NUA, dalam data hingga 2019 NUA



sudah membuka cabang di 22 dari 34 provinsi di seluruh penjuru Afghanistan dan menargetkan akan tersebar ke seluruh propinsi, artinya dalam kurun waktu 2014-2019 perkembangan NUA sangat pesat sehingga penulis tertarik untuk mengulas sejauh *Faith-Based diplomacy* Nahdlatul ‘Ulama ini dapat mewujudkan perdamaian di Afghanistan (Fathoni 2019).

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian melalui konsep *Faith-Based diplomacy*, *Faith-based diplomacy* merupakan bentuk *track two diplomacy* atau diplomasi non-resmi yang menggabungkan antara keyakinan agama dengan misi perdamaian internasional (Monge 2003). Tentunya penulis membutuhkan beberapa literatur sebagai pembanding dari penelitian yang dilakukan penulis yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga di akhir tulisan, dapat memudahkan penulis untuk menunjukkan pembahasan yang belum maupun masih sedikit dibahas dalam penelitian lain serta mengangkat topik tersebut menjadi penelitian penulis.

Salah satu penelitian yang penulis gunakan sebagai literatur adalah jurnal penelitian karya Badrus Sholeh, terbitan *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* berjudul “*Resolusi Konflik di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia*” yang dirilis pada tahun 2017. Badrus dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Indonesia yang memiliki predikat sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar sekaligus menjadi salah satu negara dengan demokrasi terbesar di dunia merupakan suatu hal yang sangat berperan penting terhadap

negosiasi dan juga perdamaian tingkat regional maupun internasional. Hal ini dapat terjadi berkat Indonesia memiliki tokoh-tokoh Muslim yang aktif dalam perdamaian baik di kalangan masyarakat Indonesia maupun lintas negara. Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah di antara mereka yang aktif dalam pertemuan lintas agama dan negara untuk mewujudkan perdamaian global. Sebagai penduduk mayoritas, Muslim Indonesia juga aktif melakukan mediasi dan perdamaian antara Muslim di Thailand Selatan dan pemerintah Thailand, serta antara Muslim di Filipina Selatan dan pemerintah Filipina, di antaranya adalah Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh Nahdlatul 'Ulama. Melalui pendekatan Muslim tradisional dan tradisi Melayu, Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh NU melakukan komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh pesantren dan madrasah di kedua wilayah yang hingga saat ini masih bergolak (Sholeh 2017).

Peneliti terdahulu menilai pendekatan mereka lebih efektif daripada pemerintah resmi, yang dianggap melakukan tindakan diskriminatif baik secara politik, ekonomi dan agama terhadap minoritas Muslim. Kunjungan yang dilakukan ulama Muhammadiyah dan NU di Thailand Selatan dan beberapa upaya perdamaian di Filipina akan menjadi hal yang sangat positif tidak hanya bagi imej positif tentang Islam Indonesia, tetapi lebih jauh lagi dan akan berdampak pada bagaimana Muslim Indonesia ikut terlibat aktif dalam perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bahkan inisiatif ini telah melampaui benua lain yakni terciptanya rekonsiliasi di Irak, kedamaian di Palestina dan Iran. Kedamaian oleh Muslim Asia Tenggara ini harus direvitalisasi, dengan kerjasama yang kuat antara Ulama dan Umara. Ini akan membuat Muslim Indonesia dapat menciptakan wilayah yang damai dan makmur di berbagai belahan dunia, khususnya Asia Tenggara (Sholeh

2017). Peneliti terdahulu menjadikan NU sebagai objek penelitian, dalam penelitiannya juga fokus terhadap peran NU sebagai organisasi keIslaman dalam resolusi konflik di Asia Tenggara. Sedangkan penulis akan fokus terhadap analisis perspektif dan kontribusi Nahdlatul ‘Ulama dalam proses perdamaian di Afghanistan menggunakan konsep *Faith-Based diplomacy*, literatur ini juga dapat penulis jadikan sebagai pembanding dimana peneliti terdahulu juga fokus terhadap peran NU di Asia Tenggara sedangkan penulis akan fokus kepada peran NU dalam konflik suku di Afghanistan.

Literatur selanjutnya adalah jurnal penelitian karya Andi Purwono, terbitan Sosio Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora berjudul “*Diplomasi Kiai Nahdlatul ‘Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional*” yang dirilis pada tahun 2020. Dalam isinya Andi menjelaskan bahwa sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia, Nahdlatul ‘Ulama memiliki watak global sedari awal pembentukannya. NU juga turut memperjuangkan kebebasan bermazhab yang dianut oleh umat Islam dari berbagai belahan dunia dan hal ini dapat dikatakan sebagai watak global yang dimiliki oleh NU. Hal ini juga dapat dilihat dari keikutsertaan dan keaktifan NU dalam konferensi-konferensi yang diadakan dan juga diikuti oleh NU seperti, *International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* dalam konferensi ini NU berperan sangat penting dalam melakukan promosi dan juga transformasi terhadap pemikiran Islam moderat dan mengaktualisasikan *Islam Rahmatan lil ‘alamin*. Selanjutnya terdapat Al- Multaqa as-Sufy al-Alamy / *World Sufi Forum*, yang mana forum internasional ini berupaya untuk mensosialisasikan norma *Rahmatan lil ‘alamin* sekaligus mendorong ide Islam dalam perdamaian internasional khususnya di dunia Islam. Dan terdapat pula *International Summit of*

*the Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)* yang muncul akibat keprihatinan NU melihat dunia Islam yang diisi oleh banyaknya perang saudara dan berupaya mendorong terjadinya kedamaian dalam dunia Islam dengan melihat hal-hal positif yang terdapat pada Islam di Indonesia (Purwono 2020).

Melalui berbagai perhelatan internasional tersebut menjadi bukti upaya diplomasi yang dilakukan oleh para kiai organisasi Islam Nahdlatul ‘Ulama dalam menyebarkan norma Islam ke dunia internasional. NU sebagai organisasi Islam tidak hanya berusaha mensosialisasikan Islam moderat sebagai ajaran universal, tetapi juga menggerakkan jejaring ulama Internasional, serta berusaha mengerem laju radikalisme berbaju agama. Para tokoh NU secara pribadi maupun secara organisatoris juga bergerak dinamis mewujudkan perdamaian dunia (Purwono 2020). Penulis menilai bahwa penelitian yang dilakukan oleh Andi ada kesamaan yaitu meneliti konsep diplomasi NU melalui konferensi internasional yang melibatkan Ulama, hal ini juga terjadi dalam upaya NU dalam proses perdamaian di Afghanistan dimana NU melibatkan ulama lokal Afghanistan untuk kemudian melakukan pertemuan yang tujuannya adalah membahas pemersatuan prinsip untuk upaya perdamaian. Namun dalam penelitian terdahulu tidak terlalu dibahas bagaimana konsep yang diterapkan dalam upaya perdamaian di Afghanistan menggunakan konsep *Faith-Based diplomacy*, yang akan penulis analisis.

Berikutnya ada literatur dari penelitian Beta Arif Muhammad, Najamuddin Khairur Rijal, Gonda Yumitro yang dirilis pada tahun 2018 “*The Roles of International Conference of Islamic Scholar (ICIS) in Conflict Resolution of South Thailand*” terbitan International Institute for Science, Technology & Education (IISTE). Peneliti menjelaskan sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di

Indonesia, Nahdlatul 'Ulama membuktikan signifikansi peranannya dalam merepresentasikan citra Islam sebagai agama yang membawa kedamaian secara universal melalui asistensi yang dilakukannya dalam forum ICIS atau International Conference of Islamic Scholar pada tahun 2004. Pembentukan ICIS digagas oleh tokoh NU, yakni KH Ahmad Hasyim Muzaki dan Dr N. Hasan Wirajuda, sebagai forum dialog yang berusaha menengahi ketegangan paham bangsa barat, terhadap Islam pasca terjadinya Peristiwa 9/11. Oleh karena itu, ICIS yang keberadaannya kini diakui oleh PBB, juga menunjukkan peranan aktifnya dalam memfasilitasi dialog antara Pemerintah Kerajaan Thailand dengan kaum Muslim minoritas yang menjadi penduduk di wilayah selatan Thailand (Beta Arif Muhammad 2018).

Selanjutnya peneliti terdahulu juga menjelaskan secara garis besar, perselisihan tersebut berawal dari adanya upaya kelompok Muslim untuk memisahkan diri akibat integrasi yang diinginkan oleh Pemerintah Thailand terhadap kelompok tersebut, di mana integrasi tersebut juga diikuti oleh adanya asimilasi yang “menekan” kaum Muslim untuk menyelaraskan kebudayaan, adat, dan agama mayoritas di Thailand, yakni Buddha. Untuk mengatasi hal tersebut, NU melalui ICIS berusaha menyelesaikan konflik ini melalui diplomasi jalur dua, di mana ICIS menawarkan adanya forum diskusi interaktif tanpa melibatkan tindak kekerasan sebagai resolusi utama yang ditawarkan. KH Hasyim Muzadi, sebagai tokoh dalam ICIS menyarankan dialog terbuka antara Pemerintah Thailand dengan tiga provinsi oposisi di Thailand Selatan, dengan mempromosikan Pancasila sebagai ideologi yang mampu membentuk unifikasi dalam masyarakat yang multikultural. Selain itu, ICIS juga memberikan peringatan akan ancaman infiltrasi gerakan transnasional Islam lainnya, yang dapat ikut memperkeruh permasalahan

yang ada. Tidak hanya itu, ICIS juga menawarkan program bantuan, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat Muslim di Thailand Selatan, sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi paralel, sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim di sana yang sebelumnya belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Thailand (Beta Arif Muhammad 2018). Dalam penelitiannya mereka menggunakan konsep *second track diplomacy*, yang mana dijelaskan juga oleh Joseph Montivell sebagai ahli teori bahwa *second track diplomacy* ini adalah sebuah bentuk diplomasi informal dimana interaksi non-resmi terjadi oleh suatu kelompok atau negara dengan tujuan mengembangkan juga membangun strategi, membawa pengaruh terhadap opini publik, mengatur sumber dayanya baik material maupun sumber daya manusianya menggunakan cara-cara yang membawa dampak dalam penyelesaian suatu konflik (Beta Arif Muhammad 2018). Sedangkan penulis disini menggunakan konsep *Faith-Based diplomacy* yang dimana dalam buku "*Faith-Based Diplomacy Trumping Realpolitik*" karya Monge tahun 2003 dijelaskan, *Faith-based diplomacy* merupakan bentuk *track two diplomacy* atau diplomasi non-resmi yang menggabungkan antara keyakinan agama dengan misi perdamaian internasional. Peneliti terdahulu menggunakan NU sebagai objek penelitiannya dan konsep yang digunakan adalah *second track diplomacy*, sedangkan penulis akan fokus kepada pendekatan *Faith-Based diplomacy*.

Dalam jurnal penelitian "*Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia*" karya Andi Purwono yang dirilis Jurnal Politik Profetik (JPP) pada tahun 2013, dalam isinya Nahdlatul 'Ulama sebagai NGO mempunyai peran

diplomasi dalam keamanan internasional, dijelaskan juga bahwasannya aktor negara tidak lagi mendominasi politik internasional, justru aktor non-negara yang baru bermunculan membawa pengaruh dalam arena politik internasional bahkan perannya semakin terlihat ketika konflik-konflik internasional terjadi. Dalam penelitiannya Andi menjelaskan bahwa era konflik sudah bergeser terhadap isu yang semakin sensitif dan salah satunya adalah suku (Purwono 2013). NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tentunya turut andil menjalankan diplomasi dalam resolusi konflik internasional, ditambah Indonesia sebagai negara majemuk sangat mudah dijadikan alat konflik bagi kelompok-kelompok separatis maupun radikal, penelitian ini membantu menerjemahkan prinsip diplomasi yang dibawa oleh NU dalam upaya perdamaian, khususnya dalam arena konflik internasional.

Peran Nahdlatul 'Ulama sendiri sebenarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip agama Islam, dalam diplomasi yang dilakukan terdapat elemen keagamaan seperti prinsip *Rahmatan lil 'alamin* ajaran kasih sayang terhadap alam semesta, bersikap moderat, selanjutnya konsep *ukhuwah* atau persaudaraan serta kemanusiaan, yang terakhir prinsip *fiqh maqashid* yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-quran, Hadits, Ijtihad, Ijma, Qiyas, Syara', dan Qaul sahabat (Purwono 2013). Tentunya hal tersebut sangat mungkin diterapkan dalam diplomasi NU di Afghanistan. *Conflict of communal identity* yang terjadi di Afghanistan terjadi karena isu agama, ras, identitas, dan suku yang masih kental di sana. Konflik suku di Afghanistan sudah berlangsung semenjak hampir tiga dekade yang lalu lamanya bisa segera diselesaikan jika menyesuaikan situasi dan kondisinya.

Dari beberapa referensi berupa buku, jurnal, dan lainnya diatas, yang membahas tentang Nahdlatul ‘Ulama, konflik, perdamaian, dan konsep diplomasi. Faktor diplomasi kesatuan-persatuan memang cukup penting dan berharap dapat memberi pengaruh dalam hal tersebut. Ini kemudian menjadi sebuah literatur yang dapat mendukung untuk penulisan analisis yang akan penulis bahas terkait dengan diplomasi NU melalui konsep *Faith-Based diplomacy* dalam studi kasus konflik suku yang terjadi di Afghanistan. Selain itu, posisi penulis diatas belum cukup kompleks sebagai penjelas faktor-faktor yang menjadi latar belakang. Penelitian yang akan saya lakukan akan berfokus Untuk mengetahui perspektif dan kontribusi NU dalam proses perdamaian berdasarkan nilai keIslaman yang dianutnya dan sejauh mana NU dalam mewujudkan perdamaian melalui *Faith-Based diplomacy* dalam konflik suku di Afghanistan, yang dimana hal tersebut dapat menjadi pelengkap. Sehingga hal tersebut dapat membantu semakin kompleksnya informasi yang dapat dicari dan digunakan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisa konflik suku yang terjadi di Afghanistan dan upaya Nahdlatul ‘Ulama dengan perantara NUA untuk mewujudkan perdamaian melalui konsep *Faith-Based diplomacy* Nahdlatul ‘Ulama, diperlukan kerangka pemikiran serta landasan teori dalam membantu penulis untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai. Teori adalah kerangka berpikir yang dibangun dengan menghubungkan sejumlah konsep melalui proposisi-proposisi yang logis sehingga dapat memberikan makna terhadap sejumlah fakta yang keberadaannya tidak beraturan. Oleh karena itu, untuk



memudahkan penulis dalam meneliti, teori adalah pengampu sehingga dapat mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan *Faith-Based diplomacy*, menurut ahli diplomasi Hasyim Djalal di dalam bukunya menyebutkan diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung pandangan kita itu, tanpa perlu menggunakan kekerasan (Djalal 1990). Sedangkan Monge dalam bukunya "*Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik*", *Faith-Based diplomacy* merupakan bentuk *track two diplomacy* atau diplomasi non-resmi yang menggabungkan antara keyakinan agama dengan misi perdamaian internasional. *Faith-Based diplomacy* dengan demikian lebih fokus terhadap rekonsiliasi dibandingkan resolusi konflik. Dalam *Faith-Based diplomacy*, perdamaian bukan sekadar kondisi tidak adanya konflik, namun juga pemulihan hubungan yang sehat dan saling menghormati di antara para pihak yang sebelumnya berkonflik (Monge 2003).

Bentuk penyelesaian dalam *Faith-Based diplomacy* adalah dengan beberapa langkah yang berbeda untuk mewujudkan perdamaian. Yang pertama, dengan menawarkan visi baru yang mendorong para pihak untuk menciptakan keadaan dan hubungan baru satu sama lain. Setiap agama besar dunia berisi seperangkat prinsip moral untuk mengatur hubungan manusia. Seruan bersama untuk mengamalkan prinsip-prinsip perdamaian yang dipegang bersama ini dapat menciptakan dinamika spiritual untuk mengatasi hambatan sekuler dan bergerak menuju rekonsiliasi. Selanjutnya, membangun jembatan antara yang nyata (konflik yang sedang terjadi) dan tidak berwujud (entitas spiritual dan prinsip keagamaan) dalam kelompok yang

beragam sehingga mereka dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi mereka masing-masing secara lebih efektif dalam satu komunitas plural yang mau bekerjasama untuk perdamaian. Yang terakhir ada pemulihan konflik, biasanya melalui mediasi. Pemulihan konflik ini bertujuan untuk mengakhiri permusuhan, menyelesaikan masalah yang mendasari konflik, dan untuk memulihkan hubungan pihak yang berkonflik. Intervensi ini juga berfokus pada penyembuhan luka sejarah yang merupakan hasil dari peristiwa yang diingat secara kolektif oleh komunitas berbasis identitas tertentu dan ingatan tersebut membawa rasa sakit yang menghambat perkembangan komunitas tersebut. Adapun *Faith-Based diplomacy* dapat memanfaatkan nilai agama terkait pengampunan dan pemaknaan terhadap penderitaan serta janji akan kesembuhan sejati (Monge 2003).

Pengaruh positif agama dapat dijadikan elemen dalam strategi *preventive engagement* secara efektif dengan melibatkan aktor non-negara seperti Nahdlatul 'Ulama sebagai NGO, dalam berurusan dengan agama, NGO, terutama mereka yang digerakkan oleh individu dari berbagai latar belakang agama dan memiliki keterampilan diplomasi dan pemecahan agama menjadi cocok untuk dikerahkan ke tempat-tempat bermasalah. Dengan adanya keberadaan NGO yang terdiri atas individu beragama sama dengan mereka yang berada di tempat konflik, pihak lokal merasa diyakinkan bahwa seseorang dalam tim memahami kepekaan agama mereka, termasuk masalah budaya yang mempengaruhi harga diri dan martabat mereka (Monge 2003). Hal ini masuk kepada salah satu karakteristik *Faith-Based diplomacy*, yaitu Beroperasi dengan otoritas spiritual tertentu sebagai upaya *peacemaking*. *Faith-Based diplomacy* menggunakan dua cara untuk membangun legitimasi di antara pihak-pihak yang berkonflik: melalui ikatan mereka dengan

lembaga keagamaan yang kredibel atau melalui kepercayaan yang dibangun dari karisma pribadi sebagai tokoh agama, Namun upaya *Faith-Based diplomacy* dapat kehilangan kredibilitas mereka jika ternyata gagal dalam menghargai perbedaan antara tradisi agama, atau menyinggung pemeluk agama lain dengan menyamaratakan semua tradisi agama. (Monge 2003). Karena yang terjadi pada konflik Afghanistan adalah konflik suku dengan latar belakang agama yang mayoritas, hal tersebut tentu sangat relevan dalam pengaplikasiannya, karena latar belakang tradisi suku, budaya, dan tradisi lainnya di sana dapat menimbulkan gesekan.

Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, di dalamnya selalu memberi ruang khusus untuk kemunculan tren diplomasi terkini. Salah satunya adalah *Faith-Based diplomacy* yang penulis gunakan sebagai landasan konseptual, hal ini bisa jadi adalah sebuah tanda untuk tatanan internasional bagaimana kecenderungan masyarakat dunia bergeser dengan dibuktikannya kehadiran *Faith-Based diplomacy* sebagai upaya pencegahan maupun penyelesaian suatu konflik untuk mewujudkan penerimaan kehidupan dengan segala aspeknya (agama, suku, ras, budaya), keterlibatan semua pihak dalam perumusan solusi, penyelesaian konflik secara damai individu maupun kelompok, kembali memulihkan hubungan yang sehat, dan keadilan sosial sebagai kekuatan hubungan antar manusia (Monge 2003).

## **1.7 Argumen Sementara**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat pembelajaran kepada pembaca terkait hadirnya Nahdlatul 'Ulama dalam fenomena

konflik suku yang berkepanjangan di Afghanistan. Penduduk Afghanistan mayoritas beragama Islam, namun terbagi menjadi beberapa kelompok suku atau etnis. Agama menjadi penting untuk dikaji kembali dalam studi hubungan internasional, terdapat kompleksitas dalam relasi kuasa antara agama dengan pemeluknya yang memiliki daya dorong yang kuat untuk menggerakkan pemeluk agama untuk melakukan hal yang mendorong perdamaian ataupun mengarah pada konflik. Agama juga masih menjadi salah satu akar dari kebudayaan dan identitas kelompok besar masyarakat di dunia dan pergesekan antar agama jika tidak segera ditangani secara tepat dapat menyebabkan eskalasi konflik, agama masih menjadi salah satu fondasi identitas dan perilaku masyarakat di berbagai belahan dunia sehingga pemahaman terhadap agama dengan benar serta pemanfaatan ilmu agama secara diplomatis dapat membantu kita mewujudkan perdamaian di dunia. Nahdlatul 'Ulama dalam langkah *Faith-Based diplomacy* melalui Nahdlatul 'Ulama Afghanistan (NUA) sudah membuka cabang di 22 dari 34 provinsi di seluruh penjuru Afghanistan hingga 2019 dan menargetkan akan tersebar ke seluruh provinsi ditambah dengan mendapat dukungan dari ribuan ulama NUA semakin percaya diri. Melalui Nahdlatul 'Ulama sebagai *Faith-Based Organization*, dengan langkah membangun visi bersama dalam perdamaian untuk menciptakan hubungan baru yang baik dibuktikan dengan pertemuan yang berkelanjutan, membangun jembatan dalam penyampaian aspirasi kelompok untuk perdamaian, dan pemulihan konflik sebagai langkah mediasi konflik. Demi mengembangkan moderasi Islam di Afghanistan dan memupuk sikap toleran sejak dini di Afghanistan, NU dan NUA terus mengupayakan perdamaian dibuktikan dengan pemberian 50 beasiswa kepada anak-anak muda Afghanistan di tahun 2019. Juga melalui gerakan *people-to-people*

NUA terus membuktikan bahwa konflik bisa diredam jika alat peredamnya sesuai dengan situasi yang terjadi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan model penelitian deskriptif dimana dengan menggunakan metode ini hasil yang didapatkan lebih optimal dan realistis, sehingga pemahaman terhadap isu akan lebih jelas dan terarah.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah Nahdlatul 'Ulama dalam menjalankan *Faith-Based diplomacy*, sedangkan objek penelitiannya adalah proses perdamaian Nahdlatul 'Ulama dalam konflik suku di Afghanistan 2014-2019.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai topik tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan primer. Adapun yang termasuk ke dalam sumber sekunder adalah seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademik, publikasi, surat kabar harian ataupun majalah berkala. Sumber sekunder yang dipilih juga berdasarkan pada reputasi dan kredibilitas media atau penerbit serta kaitannya dengan topik

yang diteliti. Sedangkan sumber primer yang penulis gunakan adalah menggunakan metode wawancara dan riset observasi, seperti dokumen resmi Nahdlatul 'Ulama terkait misi perdamaian di Afghanistan, wawancara dengan pihak terkait juga penulis jadikan sebagai metode pengumpulan data.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian merupakan suatu tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dan dimulai dari penelitian terdahulu yang berkaitan, dan interpretasi penelitian ataupun laporan penelitian. Prosedur ini dianggap penting karena sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, data tersebut akan dianalisis dalam beberapa tahapan, dimulai dari melihat hasil laporan terkait penelitian yang kita ambil. Selanjutnya, pengambilan data dimana penulis menggunakan data sekunder dan primer untuk menunjang penelitian tersebut. Sampai dengan tahapan penulis dapat mendeskripsikan atau menafsirkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dan melakukan interpretasi dengan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian tersebut.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian dan pembahasan ini, terdapat sistematika penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan, penulis menerangkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Latar Belakang, Pada bagian bab kedua ini akan dibahas mengenai latar belakang mengenai alasan penulis mengambil judul “Analisis Diplomasi Nahdlatul ‘Ulama Melalui Konsep *Faith-Based diplomacy* Studi Kasus: Konflik Suku di Afghanistan (2014-2019)”. Selanjutnya mengerucut kepada diplomasi yang dilakukan Nahdlatul ‘Ulama dimana penulis berfokus dalam analisis terhadap pendekatan diplomasi berbasis *Faith-Based* dalam dinamika konflik suku di Afghanistan.

Bab 3 : Analisa, Pada bagian bab ketiga ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian penulis terkait sejauh mana Nahdlatul ‘Ulama dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan menggunakan konsep pendekatan *Faith-Based diplomacy*, dimana didalamnya memaparkan faktor awal terjadinya konflik suku di Afghanistan sehingga Nahdlatul ‘Ulama hadir membantu menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi atas permintaan Ulama lokal Afghanistan yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan (NUA), dalam kurun waktu 2014-2019.

Bab 4 : Kesimpulan, Dalam bab ini berisi uraian kesimpulan terkait bagaimana peran Nahdlatul ‘Ulama dalam membantu proses perdamaian melalui konsep *Faith-Based diplomacy* dalam studi kasus konflik suku di Afghanistan.

## BAB 2

### NAHDLATUL 'ULAMA DALAM *FAITH-BASED DIPLOMACY* GLOBAL

Keimanan dan agama merupakan dua aspek yang seringkali dianggap 'punah' dalam studi hubungan internasional dan dilihat sebagai lawan dari modernisasi Barat. Padahal, agama merupakan landasan hidup paling mendasar bagi banyak kelompok masyarakat di dunia. Dengan demikian, agama dapat menjadi sumber konflik namun juga salah satu instrumen penyelesaian konflik di dunia. Hal inilah yang baru disadari oleh penyusun kebijakan era modern. Dalam melakukan utilisasi terhadap keimanan untuk membantu penyelesaian konflik dan mendukung proses peacemaking diperlukan aktor agama yang kompeten dalam urusan politik dan diplomasi. Adapun, terdapat beberapa faktor yang perlu dipenuhi oleh seorang pemimpin agama atau institusi agama untuk dapat memiliki pengaruh dalam politik internasional, khususnya dalam diplomasi perdamaian. Faktor tersebut antara lain adalah: Pengaruh yang kuat dan diakui di masyarakat, Reputasi sebagai kekuatan politik yang mampu membawa perubahan berdasarkan nilai keagamaan yang dihormati bersama, Kemampuan untuk mendamaikan dan memansuaikan kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik, serta Kemampuan untuk memobilisasi dukungan masyarakat, nasional, dan internasional untuk proses perdamaian (Monge 2003).

Terlepas dari itu, agama sendiri dalam hubungan internasional adalah pedang bermata dua. Kekuatan agama berasal dari otoritas supranatural atas pemeluknya dan karakteristik ini tidak dimiliki oleh pemimpin negara pada umumnya. Otoritas ini mampu memotivasi masyarakat untuk turun ke dalam peperangan untuk mengorbankan nyawa demi negara mereka. Konteks yang



demikian dapat menyebabkan konflik atau dapat meredakannya. Agama dapat menjadi faktor pendorong, bagian, dan alat penyelesaian konflik namun pada intinya, seluruh agama mendorong kepedulian terhadap sesama dan nilai kemanusiaan. Kendati demikian, dalam perkembangannya, nilai kemanusiaan dan perdamaian ini masih belum dapat diartikulasikan dengan baik. Masih perlu kajian lebih lagi untuk menemukan cara menggunakan agama sebagai sumber *power* yang positif dalam menyelesaikan konflik yang selama ini sulit untuk diselesaikan dengan diplomasi tradisional, seperti konflik etnis, perang suku, dan permusuhan agama (Monge 2003).

### **2.1. Nahdlatul ‘Ulama Sebagai Aktor *Faith-Based Diplomacy***

Nahdlatul ‘Ulama adalah organisasi keagamaan yang berdiri pada tahun 1926, tepatnya tanggal 31 Januari. Organisasi ini (NU) didirikan oleh KH. Hasyim Asyari atas segala pertimbangan dan perjuangan yang panjang, NU berdiri atas respon dari berbagai problem keagamaan, seperti peneguhan mazhab, juga alasan-alasan kebangsaan dan kehidupan sosial-masyarakat. Sebelum lahirnya NU sudah ada organisasi bernama *Nahdlatul Wathan* atau kebangkitan tanah air yang saat itu diketuai oleh KH. Wahab Chasbullah pada 1916, namun bentuknya tidak formal bisa dikatakan wadah kyai-kyai pesantren saat itu. Keterbelakangan ekonomi dan mental yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajah membuat kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Pada 1918 dibentuk *Nahdlatul Tujjar* atau pergerakan kaum saudagar untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Untuk membentuk suatu organisasi yang bersifat kompleks dan formal maka, masyarakat dan para kyai sepakat mendirikan

Nahdlatul 'Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar (Ahmad 2020).

Nahdlatul 'Ulama pada saat itu lahir atas kebutuhan umat Islam seluruh dunia, karena terdengar kabar bahwa Dinasti Saud di Arab Saudi merencanakan pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi pusat ziarah seluruh Muslim di dunia yang dianggap bid'ah dalam mazhab mereka. Selanjutnya, NU melakukan diplomasi dengan Raja Ibnu Saud terkait rencana pembongkaran situs bersejarah di Arab Saudi salah satunya adalah makam Nabi Muhammad SAW, karena raja Arab mengikuti mazhab yang tidak memperbolehkan praktik ziarah, jelas NU menolak keras akan hal tersebut ditambah desakan umat Muslim di seluruh dunia, atas desakan sosial itu NU mengirimkan panitia kecil yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah untuk berdiplomasi menyampaikan beberapa permohonan, kelompok NU yang diberangkatkan dinamakan Komite Hijaz, yang akhirnya menjadi salah satu cikal bakal berdirinya Nahdlatul 'Ulama, dan terbukti berhasil. Manfaatnya bisa kita rasakan hingga kini sebagai umat muslim Ahlussunnah Wal Jamaah sehingga sampai saat ini situs bersejarah di Arab Saudi tetap terjaga (Anam 2010). Maka pada saat itu diresmikanlah Nahdlatul 'Ulama tepat tanggal 31 Januari 1926.

Penulis melihat bahwa sejarah dibalik berdirinya NU sudah cukup membuktikan bahwa organisasi ini dibangun secara matang oleh para pendiri sebagai jawaban problematika sosial masyarakat lokal maupun internasional sekalipun. Oleh karena itu, urgensi dari kehadiran organisasi keagamaan seperti NU tidaklah semata-mata hanya fokus ke dalam bidang keagamaan saja. Melalui NU, dapat dilihat bahwa perannya tidak terbatas dalam dimensi keagamaan semata. NU

berhasil menunjukkan, bahwa melalui upaya dan usahanya organisasi keagamaan mampu untuk mengambil bagian menjadi penyelesai konflik dan menciptakan perdamaian di kancah internasional.

Dalam studi kasus konflik di Afghanistan NU secara langsung berperan dalam upaya perdamaian, diplomasi yang dilakukan NU diterima penuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan karena konsep pemikiran NU dianggap sesuai dengan misi perdamaian. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan KH. Mun'im DZ yaitu panitia yang terlibat dalam dialog NU – Afghanistan dan pada saat itu menjabat sebagai Wasekjend PBNU. NU diterima di Afghanistan karena NU dianggap organisasi ulama yang independen di luar kepentingan faksi-faksi yang berurusan terutama Amerika Serikat dan juga Arab Saudi, pihak-pihak di Afghanistan tidak mau jika dimediasi oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan Barat atau Arab Saudi, sedangkan NU adalah organisasi ulama yang netral maka dari itu mereka menerima kehadiran NU, dibalik itu juga Islam Afghanistan mempunyai kedekatan sejarah dengan Indonesia khususnya NU saat era presiden Soekarno (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

### *2.1.1 Konsep Pemikiran NU Dalam Konteks Perdamaian Global*

Secara umum terdapat dua kategori perdamaian menurut Johan Galtung, yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah suatu kondisi dimana tidak adanya perang atau kekerasan fisik yang terlihat. Sementara perdamaian positif adalah suatu kondisi dimana keadilan dan kebebasan telah diperoleh dalam masyarakat yang tengah berkonflik, sehingga menyingkapkan kekerasan struktural dan kekerasan budaya (Galtung 1996).

Konsep pemikiran NU dalam konteks perdamaian global penulis menggunakan contoh apa yang dilakukan NU dalam mengupayakan perdamaian di Afghanistan, upaya pertama NU dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan, dilaksanakan melalui pembentukan sebuah forum dialog. Forum tersebut dilakukan pada 18 Juli 2011, dengan tajuk “Forum Konsultasi untuk Perdamaian di Afghanistan”. Forum ini dihadiri oleh dua puluh tokoh masyarakat dan agama dari Afghanistan yang sangat berpengaruh. Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dan pertukaran informasi tentang ide atau solusi alternatif seperti apa untuk menciptakan perdamaian di tengah masyarakat Afghanistan (Irvan Aladip Mahfudin 2021).

Forum pertama ini berhasil menyepakati, (a) bahwa inti agama Islam *Rahmatan lil ‘alamin*, dan bertumpu pada prinsip *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i’tidal*; (b) setuju untuk mengakhiri konflik di Afghanistan; (c) peran fasilitator diperlukan untuk membangun perdamaian dan harus diterima seluruh komponen bangsa. Melalui forum ini, NU sebagai aktor transnasional berbasis agama, berhasil memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan menengahi konflik yang terjadi (Irvan Aladip Mahfudin 2021).

*At-Tasamuh*, Nahdlatul ‘Ulama sebagai golongan Ahlussunnah Wal Jamaah juga menerapkan sikap toleransi atau *tasamuh*. Seperti halnya menghargai dan menerima perbedaan, juga menghormati sesama walau berprinsip beda. Namun yang perlu digaris bawahi bukan berarti toleransi ini dijadikan alat untuk meyakini atau membenarkan aqidah dan keyakinan yang berbeda, hanya sebatas menghormati dan menghargai pilihan orang lain dalam keteguhan keyakinan. Dengan sikap *tasamuh* yang ditanamkan Ahlussunnah Wal Jamaah

sebagai contoh masyarakat Indonesia yang notabene mempunyai ragam budaya nusantara akan menciptakan ummat Islam yang dinamis.

*At-Tawazun*, adalah penghubung bagi *tawassuth* dan juga *i'tidal* yang memiliki makna keseimbangan atau *balance* yang berasal dari kata *tawazna*, dalam skala kehidupan yang cukup luas dan banyak dimensi di dalamnya, penting untuk kita menjaga keseimbangan mulai dari jasmani, rohani, dan juga menjaga stabilitas hidupnya dengan mengamalkan sikap tidak berlebihan. Penting untuk dapat menerapkan dan memberikan konsep *tawazun* ini karena dalam menjalani kehidupan dibutuhkan keseimbangan.

*At-Tawassuth*, yang berasal dari kata *wasath* yang berarti adil dan tengah-tengah. Merupakan pandangan atau sikap yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan, dapat dikatakan sebagai moderate atau di tengah-tengah, penanaman pendidikan seperti ini merupakan sebuah konsep yang baik di dalam lingkungan sosial dan kehidupan karena selain untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan kita, seorang Ahlussunnah Wal Jamaah juga wajib memiliki budi pekerti yang luhur, bermoral dan juga memiliki sikap yang teladan, kita sebagai generasi muda wajib memiliki pandangan dan pandai menempatkan diri di tengah-tengah serta tahu benar dan salah.

*Al-I'tidal*, *i'tidal* tidak jauh berbeda dengan *tawassuth* karena memang saling berhubungan dalam konsep ini, *i'tidal* yang berasal dari kata *I'tidal* memiliki makna tegak lurus, jika kita analogikan melalui gerakan Sholat dari membungkuk kemudian berdiri tegak lurus, kita dapat memiliki pola berfikir dimana menyelesaikan masalah yang semulanya tidak lurus menjadi lurus melalui berbagai pertimbangan yang tidak ada unsur ekstrimis dan juga sikap

memvonis. Maka dari itulah mengapa penting melakukan penanaman konsep *i'tidal* (Mun'im and Damasky 2018).

Pada kesimpulannya mengapa prinsip *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i'tidal* saling berhubungan karena penanaman sikap yang adil dan mampu mempertimbangkan suatu masalah yang semulanya menyimpang menjadi lurus serta menjaga keseimbangan demi kehidupan yang baik, dinamis dan bermanfaat. Dr. KH. As'ad Said Ali yang merupakan pemimpin dialog NU – Afghanistan sekaligus menjabat Wakil Ketua PBNU mengatakan disaat 20 ulama Afghanistan datang ke Indonesia pada 2011 dan dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani eks Presiden Afghanistan sebagai ketua rombongan secara langsung oleh para ulama NU seperti KH. Sahal Mahfudz dan KH. Musthofa Bisri dijelaskan tentang konsep *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i'tidal*. Burhanuddin Rabbani meminta konsep NU tersebut dibawa ke Afghanistan, diketahui juga Afghanistan sangat benci kepada negara-negara yang terlibat dalam konflik apalagi Barat, sedangkan Indonesia memang tidak mempunyai keterlibatan di Afghanistan sehingga kehadirannya diterima di sana, apalagi kaitannya dengan NU yang mempunyai kedekatan spiritual dan keagamaan. NU dan Taliban sama-sama Sunni, hanya berbeda Madzhab NU adalah Syafii dan Taliban adalah Hanafi, Taliban juga rata-rata pengikut tarekat tasawuf, atas dasar kedekatan itulah yang membuat NU mudah komunikasi (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

### 2.1.2 *Visi baru Nahdlatul 'Ulama*

Visi baru yang dibawa oleh Nahdlatul 'Ulama adalah *Faith-Based diplomacy*-nya salah satunya adalah konsep Islam Nusantara, banyak

intelektual NU mempunyai pandangan definisi yang berbeda-beda namun sejatinya mempunyai definisi kesimpulan yang sama, Islam Nusantara adalah Islam yang berkembang di Nusantara, pulau-pulau sepanjang Sumatera hingga Papua. Islam Nusantara hadir membawa rupa yang berbeda, tetapi sejatinya ruh Islam hanya satu *Rahmatan lil 'alamin*. Islam tetaplah ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diterapkan Nabi Muhammad Saw yang kemudian dipraktekkan untuk nantinya diikuti oleh umatnya, Islam Nusantara muncul bukan untuk mengubah konsep tersebut, Islam Nusantara mengkonsepkan Islam kedalam sistem nilai (pemahaman, pengajaran, dan pengalaman), teologi, dan fiqih ubudiyah (bermadzhab dan bersanad untuk meminimize subjektifitas, mengedepankan wisdom/kearifan) yang berpengaruh terhadap budaya Indonesia dengan karakteristik tertentu. Islam Nusantara bukanlah aliran, Islam Nusantara adalah culture atau budaya dimana Islam itu berkembang, menjunjung tinggi persatuan dengan menjadikan budaya sebagai pondasi agama, saling menghargai dan saling menghormati adalah kata kunci (Luthfi 2016).

Berdirinya Nahdlatul 'Ulama Afghanistan (NUA) lewat Nahdlatul 'Ulama sebagai role model forum-forum dialog dapat dibuka, para Ulama dari berbagai kelompok dan faksi di Afghanistan bisa duduk bersama, dengan adanya dialog terbuka tersebut Nahdlatul 'Ulama dapat mengenalkan corak Islam yang ada di Nusantara Indonesia ini Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*, Islam yang mengedepankan sikap moderat, toleransi dan persatuan (Mazrieva 2019). Data yang tercatat hingga 2019 NUA sudah membuka cabang di 22 dari 34 provinsi di seluruh penjuru Afghanistan dan menargetkan akan tersebar ke seluruh

provinsi dengan mendapat dukungan dari ribuan ulama NUA semakin percaya diri. Melalui Nahdlatul 'Ulama sebagai *Faith-Based Organization*, berharap langkah diplomasi dengan pendekatan toleransi, bersikap moderat, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan anti terhadap radikalisme hingga kekerasan diharapkan dapat membantu menyudahi konflik suku di Afghanistan yang berkepanjangan tersebut. Melalui gerakan *people-to-people* NUA terus membuktikan bahwa konflik bisa diredam jika alat peredamnya sesuai dengan situasi yang terjadi (Fathoni 2019)

Dalam wawancara penulis dengan KH. Mun'im DZ, benar bahwasannya nilai-nilai Islam Nusantara adalah salah satu visi baru yang dibawa dalam misi perdamaian di Afghanistan, dimana maksud dari nilai tersebut adalah NU menginginkan kekhasan masing-masing budaya itu diterapkan di dalam negara Islam, seperti dalam studi kasus ini NU menginginkan Afghanistan tetap sesuai dengan budaya Afghanistan, karena Taliban dianggap sudah banyak terpengaruh oleh Arab Saudi yang akhirnya menyingkirkan nilai-nilai budaya Afghanistan. Itulah yang NU ingin kenalkan kepada Afghanistan, karena di era perkembangan Taliban banyak Kuil dan Candi yang dibongkar, hal tersebut yang membuat NU ingin sadarkan. Orang-orang Afghanistan baik yang radikal ataupun moderat semuanya hampir tidak mempunyai tradisi bernegara yang baik karena kerap terjadi perang sesama tentara dan juga nilai-nilai kecintaan kepada tanah air mereka yang terus luntur, ditambah lagi dengan benderanya yang berubah-ubah, kemudian pemimpin yang berubah-ubah, bahkan termasuk lagu kebangsaan juga berubah-ubah, yang pada akhirnya orang-orang Afghanistan tidak mengenal simbol-simbol kenegaraannya. NU sebagai



mediator perdamaian merasa mempunyai tanggung jawab untuk kemudian mengenalkan lagu kebangsaan Afghanistan termasuk mengenalkan nilai Pancasila dalam beberapa kesempatan kunjungan. Mayoritas orang Afghanistan kerap kali berlindung di rumah masing-masing, yang akhirnya tidak semua mendapat kesempatan untuk berpendidikan, bahkan banyak orang Afghanistan yang tidak terdidik karena perang yang sering terjadi (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

NU mengajarkan masyarakat Afghanistan mengenal budayanya sendiri dan kembali ke tradisi juga mengenal negaranya, termasuk mengenal konstitusi negara mereka, lagu kebangsaan, karena mereka tidak banyak yang tahu ketika datang ke Indonesia, terutama siswa-siswa yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia melalui NU, karena mereka tidak sempat mempelajari itu di negaranya. KH. Mun'im DZ juga mengatakan “nilai Islam Nusantara yaitu dengan mengajak semua negara seluruh dunia terkhusus negara islam, mengapresiasi budayanya masing masing, jangan di Arab kan semua atau di Eropakan semua, nanti ada Islam Eropa ada Islam Alaska, Islam Cina, dan Islam Afrika, jadi Islam ini nanti beragam, begitulah cita cita Islam Nusantara, bukan ini dijadikan pola dunia tetapi Islam sesuai dengan karakter masing masing” (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

## **2.2. Peran Nahdlatul 'Ulama Dalam *Faith-Based Diplomacy* Global**

Kehadiran aktor non-negara di masa ini, memainkan peranan yang cukup krusial dalam kehidupan masyarakat. Seusai berakhirnya perang dingin, tidak sedikit bagian dari masyarakat yang mulai terbuka dengan organisasi-organisasi

nasional maupun internasional, dan menjadi bagian dalamnya karena menganut nilai-nilai yang sama. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa organisasi keagamaan. Salah satu diantaranya adalah Nahdlatul 'Ulama, NU adalah representatif dari kaum tradisional, yang mana berkiprah khusus dalam perkembangan dunia Islam di Indonesia dan Internasional, serta upayanya dalam memperkuat kebangkitan nasional. NU terlibat dalam kepentingan kenegaraan di berbagai aspek, mulai dari segi politik, pemberdayaan ekonomi, kebangsaan, pendidikan, hingga peningkatan sumber daya manusia (Farid 2016).

Konflik internasional yang terjadi tidak jarang berlandaskan akan pengajaran Islam, contohnya seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sebagai akibatnya, pengajaran Islam menjadi tercoreng bahkan dianggap menyesatkan bagi sebagian orang karena konflik bersenjata yang tidak kunjung selesai. Dalam situasi ini, organisasi yang bergerak di bidang keagamaan perlu untuk menampilkan diri untuk mengembalikan citra Islam, khususnya di kancah dunia internasional. Adanya kesadaran kolektif dari berbagai pihak dan signifikansi dari aktor non-negara, menjadikan bahwa bukan hal yang tidak mungkin dengan adanya intervensi dari organisasi keagamaan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pada level global Nahdlatul 'Ulama mengampanyekan nilai-nilai kemanusiaan dan Islam *Rahmatan lil 'alamin*, yang artinya NU beranggapan bahwa keseluruhan alam ini tidak hanya tercipta bagi umat Islam, tetapi juga kaum non-Muslim, bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun. Hal ini diterapkan pada keaktifan NU bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri RI dalam mengadakan *interfaith dialogue*. NU turut membentuk *International Conference of Islamic Scholars* atau ICIS, konferensi ini merupakan suatu upaya NU untuk

mengglobalisasikan nilai *Rahmatan lil 'alamin*. Upaya ini dilakukan untuk menengahi konflik panas yang terjadi, serta mengurangi kesalahpahaman dan islamophobia yang terjadi di dunia internasional sebagai dampak dari terjadinya konflik (Beta Arif Muhammad 2018). Selanjutnya Al- Multaqa as-Sufy al-Alamy / *World Sufi Forum*, yang mana forum internasional ini berupaya untuk mensosialisasikan norma *Rahmatan lil 'alamin* sekaligus mendorong ide Islam dalam perdamaian internasional khususnya di dunia Islam. Dan terdapat pula *International Summit of the Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)* yang muncul akibat keprihatinan NU melihat dunia Islam yang diisi oleh banyaknya perang saudara dan berupaya mendorong terjadinya kedamaian dalam dunia Islam dengan melihat hal-hal positif yang terdapat pada Islam di Indonesia (Purwono 2020).

NU memperdalam eksistensinya di kancah internasional melalui berbagai cara, seperti melakukan *shuttle diplomacy* yakni menemui secara bergiliran dan bergantian mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk segera berdamai melalui dialog dan negosiasi di Timur Tengah, hingga mengambil sikap yang antiterorisme. Hingga NU berhasil berkontribusi dalam pembebasan para sandera yang ditahan oleh aktivis Taliban Afghanistan di tahun 2007. Hal ini menggambarkan bahwa organisasi keagamaan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peredaan hingga penyelesaian konflik, dan menjadi salah satu alat diplomasi negara bagi negara lain. Upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh NU, berlandaskan pada *Faith-Based diplomacy* yang meyakini bahwa penciptaan perdamaian internasional dapat berjalan beriringan dengan integrasi keyakinan agama (Purwono 2013).

Urgensi dari kehadiran organisasi keagamaan seperti NU tidaklah semata-mata hanya fokus ke dalam bidang keagamaan saja. Melalui NU, dapat dilihat

bahwa perannya tidak terbatas dalam dimensi keagamaan semata. NU berhasil menunjukkan, bahwa melalui upaya dan usahanya organisasi keagamaan mampu untuk mengambil bagian menjadi penyelesai konflik dan menciptakan perdamaian di kancah internasional. Harapannya, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul ‘Ulama dapat dipandang lebih signifikan lagi di dunia internasional, dan berkontribusi lebih lagi tidak hanya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi jembatan dan penengah untuk memperbaiki citra Islam terutama di wilayah Barat.

### **2.3. Dinamika Konflik Suku di Afghanistan**

Afghanistan memiliki empat grup etnis terbesar, kelompok etnis terbesar di Afghanistan diperkirakan sekitar 45% dari populasi dan sebagian besar bermukim di selatan dan timur Afghanistan adalah Pashtun Muslim Sunni. Populasi Pashtun terbelah dua oleh perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan, yang mana dikenal sebagai *Durand Line*, dan memiliki sejarah panjang menantang otoritas negara dan legitimasi perbatasan resmi di kedua negara. Kelompok Pashtun sering dicirikan sebagai orang yang sangat mandiri dan melindungi tanah, kehormatan, tradisi, dan kepercayaan mereka. Kelompok etnis terbesar kedua di Afghanistan adalah Tajik, sebuah istilah yang mengacu kepada etnis Tajik serta penutur Persia Muslim Sunni lainnya. Orang Tajik, yang merupakan sekitar 30% dari populasi Afghanistan dan sebagian besar bermukim di timur laut dan barat, umumnya telah diterima oleh Pashtun sebagai bagian dari tatanan kehidupan di Afghanistan, yang mana hal ini ada kaitannya dengan kepatuhan umum mereka terhadap Islam Sunni (Sinno 2021).

Kelompok Muslim Sunni terbesar ketiga adalah Uzbek dan Turkmenistan, yang mana kebanyakan dari mereka bermukim di bagian utara dari Afghanistan, kelompok ini sendiri membentuk 10% dari populasi. Dan yang terakhir adalah Hazara, di mana kelompok ini sendiri terdiri dari 15% populasi dari Afghanistan dan secara tradisional tinggal di daerah pegunungan yang kasar di pusat Afghanistan, sebuah daerah di mana mereka secara historis mencari perlindungan dari suku Pashtun yang tidak menyetujui kepatuhan mereka terhadap sekte Islam Syiah (Sinno 2021).

Ketika adanya keterlibatan Uni Soviet di Afghanistan, di mana komunis mengirim aktivis mereka ke desa-desa konservatif untuk mengajar anak-anak Afghanistan dogma Marxis, masyarakat Afghanistan bangkit di dalam pemberontakan dadakan sebagai respons dari pengiriman aktivis tersebut. Setelah Soviet menarik Tentara Merah pada Februari 1989, hal ini kemudian menyebabkan penghentian bantuan AS kepada pihak-pihak Mujahidin, yang mengubah komandan lapangan Mujahidin menjadi pemimpin lokal yang independen yang demiliterisasi (Sinno 2021).

Afghanistan, khususnya daerah Pashtun, menjadi terfragmentasi, dengan ratusan pemimpin lokal dan panglima perang yang memperebutkan wilayah, produksi obat-obatan, adanya rute penyelundupan serta populasi untuk pajak. Keadaan di Afghanistan mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan setelah Tentara Merah meninggalkan wilayah tersebut (Sinno 2021).

Terjadi sebuah perang sipil di Afghanistan pada tahun 1989 hingga tahun 1992, di mana pada awalnya terjadi penarikan Soviet dari Afghanistan pada Februari 1989, dan konflik ini terjadi hingga 27 April 1992, sehari setelah

proklamasi Kesepakatan Peshawar yang memproklamasikan pemerintahan interim Afghanistan baru yang seharusnya sudah mulai bertugas pada 28 April 1992. Namun, kelompok-kelompok Mujahidin sendiri, tak semuanya bersatu dalam Persatuan Islam Afghanistan Mujahidin, pada tahun 1989-1992 dinyatakan sebagai keyakinan mereka untuk memerangi “rezim boneka” yang bermusuhan dari Republik Afghanistan di Kabul. Pada bulan Maret 1989, kelompok Mujahidin Hezb-e Islami Gulbuddin dan Ittehad-e Islami bekerjasama dengan Pakistan *Inter-Services Intelligence* (ISI) dalam menyerang Jalalabad, tetapi mereka dikalahkan pada bulan Juni pada bulan Maret 1991, koalisi Mujahidin dengan cepat menaklukkan kota Khost. Pada bulan Maret 1992, setelah kehilangan sisa-sisa dukungan Soviet yang terakhir, Sekretaris Jenderal PDPA dan Presiden Mohammad Najibullah setuju untuk bergeser dan membuka jalan bagi pemerintahan koalisi Mujahidin. Satu kelompok Mujahidin, Hezb-e Islami Gulbuddin, menolak untuk berunding dan membahas pemerintahan koalisi di bawah Perjanjian Perdamaian Peshawar yang disponsori Pakistan dan menyerang Kabul, yang mana ini kemudian memicu perang saudara (Smith 2005).

Dari tahun 1992 hingga kedatangan Taliban di September 1996, mengendalikan ibu kota menjadi tujuan politik dan militer utama dari aktor militer. Sebagian besar bentrokan terjadi di Kabul, Sebaliknya, sebagian besar provinsi mengalami penurunan aktivitas militer yang signifikan karena ratusan ribu orang telah pergi ke Pakistan dan Iran. Pemboman menghancurkan sebagian besar wilayah barat dan distrik selatan Kabul dan sebagian besar infrastruktur seperti air dan instalasi listrik rusak parah. Terjadinya peningkatan kekerasan ini adalah sebagai hasil dari proses transisi yang gagal. Berlawanan dengan kepercayaan yang

beredar, penarikan Soviet tidak membawa tentang runtuhnya rezim Kabul, yang melawan tekanan Mujahidin dengan memusatkan kekuatannya di kota-kota. Soviet yang runtuh berarti tidak adanya lagi bantuan untuk rezim Afghanistan. Selain itu juga, upaya PBB untuk menciptakan transisi yang damai gagal karena adanya hubungan yang kompleks antara gerakan bersenjata yang berbeda (Dorransoro 2007).

Pada tahun 1994, muncul sebuah kelompok yang bernama Taliban, yang mana ini berisi pejuang mahasiswa ultra-konservatif Afghanistan yang muncul dari kelompok Mujahidin dan seminari keagamaan di Pakistan dan Afghanistan, yang mengambil alih kota Kandahar di Afghanistan Selatan, dan berjanji untuk memulihkan ketertiban dan membawa keamanan di Afghanistan. Taliban dengan cepat memaksakan interpretasi keras mereka tentang Islam di wilayah yang mereka kuasai. Pada tahun 1996, Osama bin Laden kemudian tiba di Afghanistan setelah diusir dari Sudan, dan akhirnya mengambil hati pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Mohammad Omar. Pada September 1996, Taliban kemudian mengambil alih Kabul. Mereka menangkap Najibullah, mantan presiden Afghanistan, dari PBB, dan Taliban kemudian membunuhnya serta menggantungkannya tubuhnya di tiang lampu (Bloch 2021).

Pada tahun 1997-1998, Taliban mendapatkan kendali atas sebagian besar negara. Taliban kemudian memberlakukan aturan mereka, melarang sebagian besar perempuan bekerja, melarang anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan melaksanakan hukuman, termasuk pemukulan, amputasi, dan eksekusi publik. Hanya tiga negara yang secara resmi mengakui rezim Taliban: Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (Bloch 2021). Afghanistan sendiri merupakan rumah

dari banyak konflik etnis, namun yang paling intens adalah konflik etnis antara Pashtun sebagai kelompok mayoritas di Afghanistan dengan non-Pashtun (termasuk Tajik, Uzbek, dan Hazara). Taliban sendiri tumbuh dari populasi Pashtun, yang memiliki warisan untuk berusaha mendominasi kekuatan nasional, yang pada gilirannya menghasilkan perlawanan dari kelompok non-Pashtun melalui jaringan kontra-koalisi. Perang sipil di Afghanistan pada akhirnya berakhir di tahun 2001, meskipun tak berakhir dengan sepenuhnya karena semenjak itu, Afghanistan di bawah perlindungan Amerika Serikat (Larsen 2021).

AS dan NATO tentu saja melakukan intervensi di Afghanistan, faktanya, Afghanistan merupakan salah satu ambisi dari NATO. Upaya AS dan NATO untuk pemilihan demokratis dan pembangunan ekonomi terbukti sia-sia karena tidak ada kelompok etnis yang memiliki alasan untuk menganggap negara pusat Afghanistan yang korup itu sah. Perjanjian pembagian kekuasaan yang goyah antara presiden Pashtun, Ashraf Ghani, dan “kepala eksekutif” Tajik, Abdullah Abdullah, menggarisbawahi konstruksi buaatannya. Negara-negara Barat kemudian mendapati diri mereka terlibat dalam konflik etnis kuno dan dapat memeriksanya selama mereka tinggal di negara itu secara militer. Setelah dua dekade pemberontakan, Taliban tetap berkomitmen untuk membangun kembali kekuasaan Islam atas Afghanistan (Larsen 2021).

Akar dari semua konflik yang terjadi di Afghanistan adalah kelompok etnis. Hal ini juga yang membuat lamanya konflik yang terjalin antara pihak Taliban dan juga Afghanistan, karena Taliban dikuasai oleh kelompok etnis mayoritas di Afghanistan, sementara kelompok etnis lain, terutama mereka yang tidak menganut Islam Sunni seperti Pashtun merasa tidak terima. Keadaan di Afghanistan semakin

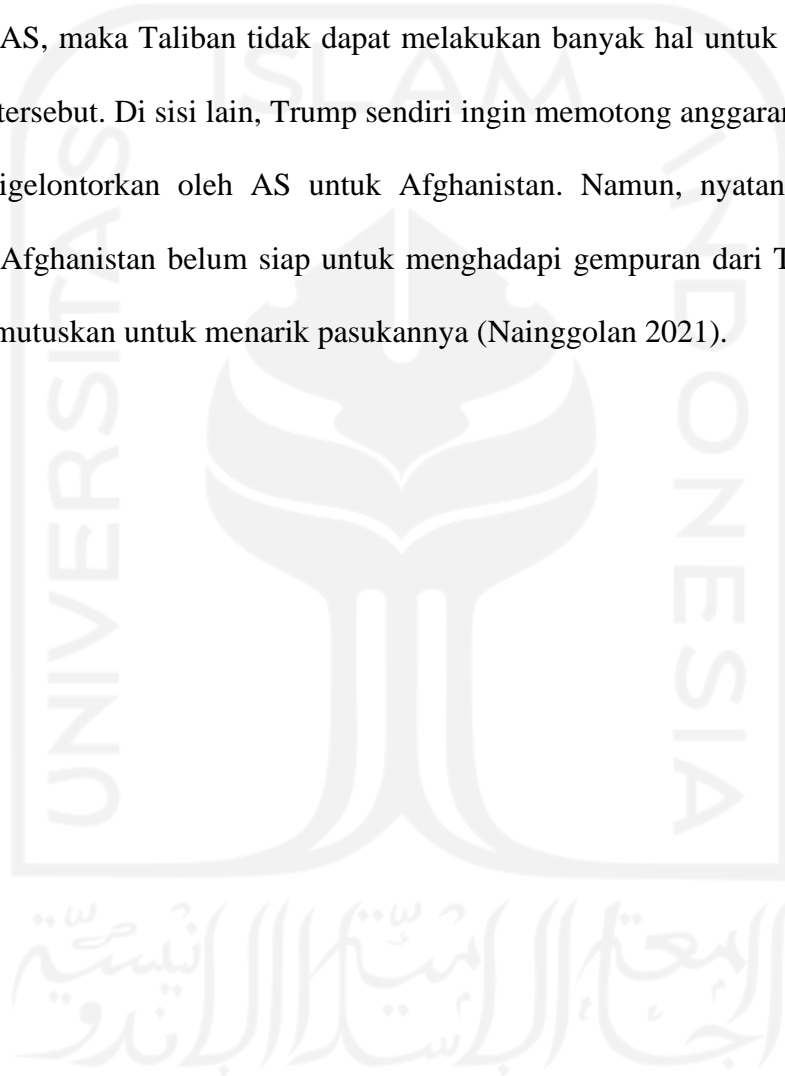


runyam ketika AS memutuskan untuk terlibat dengan meluncurkan serangan rudal di pangkalan militan Afganistan, di mana targetnya adalah Osama bin Laden karena Osama dituduh telah melakukan pemboman di kedutaan besar Amerika Serikat yang terletak di Afrika. Dengan Taliban yang menduduki Afghanistan kemudian membuat ini sebagai legitimasi bagi Amerika Serikat dan negara sekutu untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Afghanistan setelah adanya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat (Khurun'in 2017).

Setelah melakukan invasi, militer Amerika Serikat bermukim di Afghanistan sebagai bagian dari upaya untuk menghapuskan rezim Taliban, di mana Taliban sendiri memiliki andil yang sangat besar dalam semua konflik internal yang terjadi di Afghanistan, serta bertanggung jawab atas terbunuhnya puluhan ribu korban. Namun, kehadiran militer AS di Afghanistan ini ternyata telah membentuk sebuah ketergantungan yang tinggi bagi pemerintahan Afghanistan yang baru kepada militer Amerika Serikat. Afghanistan tetap mempunyai kelompok keamanan dan militer, hanya saja, kelompok ini masih tetap lemah dalam melawan Taliban sehingga selama ini, Amerika Serikat yang melindungi Afghanistan dari serangan yang diciptakan oleh Taliban. Selama Amerika Serikat berada di Afghanistan, keadaan cukup terkendali dan pemerintahan Afghanistan yang baru dapat berjalan dengan baik di bawah perlindungan Amerika Serikat (Nainggolan 2021).

Ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump merasa bahwa melindungi Afghanistan telah menjadi sia-sia. Di mata Trump, Afghanistan telah menjadi negara yang aman karena telah mampu untuk menekan Taliban sehingga tidak menciptakan huru-hara di negara itu. Trump

kemudian mengadakan perundingan dengan Taliban, yang mana perundingan ini sejak awal diprakarsai tanpa adanya persetujuan dan tidak dihadiri oleh pemerintahan Ghani. Trump mengatakan akan menarik pasukannya secara berkala dari Afghanistan. Kesepakatan ini sendiri terjadi pada tahun 2018. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang diajukan oleh Taliban, karena dengan adanya tentara militer AS, maka Taliban tidak dapat melakukan banyak hal untuk menaklukkan negara tersebut. Di sisi lain, Trump sendiri ingin memotong anggaran militer yang telah digelontorkan oleh AS untuk Afghanistan. Namun, nyatanya kelompok militer Afghanistan belum siap untuk menghadapi gempuran dari Taliban ketika AS memutuskan untuk menarik pasukannya (Nainggolan 2021).



### **BAB 3**

## **PERAN NAHDLATUL ‘ULAMA DALAM KONFLIK SUKU DI AFGHANISTAN: ANALISIS *FAITH-BASED DIPLOMACY***

Konflik suku di Afghanistan sudah berlangsung semenjak hampir tiga dekade yang lalu lamanya. Perang saudara di sana terus berlanjut ketika Uni Soviet mundur dari Afganistan pada 20 Juli 1987. Kala itu, Rezim-rezim yang berkuasa di Afghanistan setiap waktunya disibukkan dengan sejumlah pemberontakan. Dalam catatan sejarah perang saudara atau konflik antar suku di Afghanistan terjadi mulai 1989-1992 (Ewans 2002). Mayoritas penduduk di Afghanistan ialah beragama Islam yang populasinya terbagi menjadi beberapa kelompok etnis, yang terbesar adalah etnis Pashtun, disusul dengan Tajik, Hazara, Aimak, Uzbek, Turkmen, dan beberapa kelompok kecil lainnya (Jordan 2011). Tetapi, mereka tidak menjadikan itu sebagai kekayaan justru dijadikan ajang untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan siapa yang pantas untuk berkuasa atas dasar kepentingan dan perbedaan-perbedaan yang ada, penulis memberi contoh perang antara etnis Tajik dan Uzbek di Afghanistan Utara dengan etnis Pashtun yang mayoritas mendiami kawasan Afganistan Selatan. Warga suku-suku Afghanistan berkonflik karena ideologi politik dan faktor intervensi atau campur tangan negara lain. Imbasnya warga Afghanistan melupakan bahwa mereka adalah satu agama, satu rumpun, satu bangsa dan sebaiknya dapat menjadi landasan membangun rasa nasionalisme (Jordan 2011).

Terdapat 3 konsep dalam *Faith-Based diplomacy* pertama menawarkan visi baru yang mendorong para pihak untuk menciptakan keadaan dan hubungan baru satu sama lain, kedua membangun jembatan antara konflik dan prinsip agama untuk

dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi secara lebih efektif, ketiga pemulihan konflik melalui mediasi untuk tujuan mengakhiri permusuhan, peneliti melihat ini sangat relevan dengan yang NU terapkan di Afghanistan guna menyelesaikan masalah yang mendasari konflik dan untuk memulihkan hubungan pihak yang berkonflik (Monge 2003).

*Faith-Based diplomacy* lebih fokus terhadap rekonsiliasi dibandingkan resolusi konflik, rekonsiliasi yang diupayakan dengan diplomasi berbasis agama ini mengharuskan NU – Ulama Afghanistan untuk mewujudkan. 1) Penerimaan bahwa kehidupan dan segala aspeknya (ras, gender, etnis, dan budaya) memiliki sifat pluralistik, 2) Keterlibatan semua pihak dalam perumusan solusi, 3) Penyelesaian konflik secara damai antara individu dan kelompok (sesuai dengan prinsip-prinsip teori perang yang adil), 4) Pengampunan sebagai prasyarat untuk memulihkan hubungan yang sehat, 5) Keadilan sosial sebagai fondasi penataan hubungan antar manusia (Monge 2003).

### **3.1. Histori Kerjasama Nahdlatul ‘Ulama Indonesia – Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan**

Tahun 2007 Indonesia melalui Nahdlatul ‘Ulama (NU) berperan langsung dalam upaya pembebasan warga negara Korea Selatan yang menjadi sandera dari kelompok Taliban di Afghanistan. Pada kurun waktu yang sama, Muhammad Mullah Omar, seorang petinggi Taliban, bertukar surat dengan KH. As’ad Said Ali yang saat itu menjabat wakil ketua PBNU pesan tersebut dikirim dengan tujuan agar NU dapat memimpin dialog dan inisiatif perdamaian di Afghanistan. Mullah Omar, mendesak pemerintah Indonesia dan NU untuk menyuarkan situasi

masyarakat Afghanistan serta keinginannya untuk perdamaian di negeri mereka, Mullah Omar juga menyinggung ingin mempererat tali persaudaraan dengan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia era SBY pernah gagal melakukan diplomasi ketika akan membuka kedutaan dan diplomasi pemerintah saat itu tidak berhasil, juga tidak berhasil menghidupkan aktivitas ketahanan lalu NU turun untuk mengupayakan perdamaian di Afghanistan atas permintaan pemerintah Indonesia, setelah berhasil membuka komunikasi dengan pihak-pihak di Afghanistan kedutaan Indonesia dapat diaktifkan (As'ad 2022).

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia meminta NU agar dapat berkomunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Afghanistan. KH. Sahal Mahfudz sebagai bagian dari PBNU menerima permintaan tersebut dengan catatan bahwa NU harus diberi kepercayaan sepenuhnya. Keputusan untuk menerima tugas tersebut, berjalan beriringan dengan misi NU di ranah global, yaitu untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam *Rahmatan lil 'alamin*, yang berpijak pada prinsip *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang/setara), *i'tidal* (adil). Upaya pertama NU dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan, dilaksanakan melalui pembentukan sebuah forum dialog. Forum tersebut dilakukan pada 18 Juli 2011, dengan tajuk “Forum Konsultasi untuk Perdamaian di Afghanistan”. Forum ini dihadiri oleh dua puluh tokoh masyarakat dan agama dari Afghanistan yang sangat berpengaruh termasuk Burhanuddin Rabbani (*Former Afghan President, Head of High Peace Council*). Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dan pertukaran informasi tentang ide atau solusi alternatif seperti apa untuk menciptakan perdamaian di tengah masyarakat Afghanistan, tujuan forum tersebut antara lain mengenalkan Indonesia kepada tokoh-tokoh Afghanistan yang mana

Indonesia adalah negara besar dengan segala keberagamannya yang tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kesatuan hal tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan untuk Afghanistan yang selama ini menghadapi konflik berkepanjangan (Mun'im and Damasky 2018). Forum pertama ini menghasilkan *final joint statement* diantara isinya adalah, (a) bahwa inti agama Islam *Rahmatan lil 'alamin*, dan bertumpu pada prinsip *tasamuh, tawazun, tawassuth, dan i'tidal*; (b) setuju untuk mengakhiri konflik di Afghanistan; (c) peran fasilitator diperlukan untuk membangun perdamaian dan harus diterima seluruh komponen bangsa (Mun'im and Damasky 2018). Dengan alur dialog sebagai berikut.

**Gambar 1. Alur Dialog 2011**



**Sumber: Diplomasi Jalur Kedua Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan 2018 (Mun'im and Damasky 2018).**

Forum kedua dilaksanakan di Kabul, pada tanggal 5 Juni 2013, dengan tajuk “Peran Ulama dalam Perdamaian, Rekonsiliasi dan Persaudaraan di Afghanistan” yang diselenggarakan oleh *High Peace Council* bekerjasama dengan NECDO pimpinan Fazal Ghani Kakar. NECDO (*Noor Educational and Capacity Development Organization*) adalah organisasi sosial dari Afghanistan fokus terhadap isu perdamaian dan kemanusiaan, forum tersebut adalah lanjutan dari forum pertama yang berhasil dilaksanakan di Jakarta pada 2011, NU – Ulama Afghanistan terus bersama-sama untuk berkomitmen dalam mengupayakan perdamaian (Mun'im and Damasky 2018). Dalam kunjungan ke Afghanistan PBNU mengirim delegasi untuk memenuhi undangan *High Peace Council* perwakilan dari PBNU secara langsung didampingi oleh Mayjen Tajuddin Anshory yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Afghanistan, diantara delegasi tersebut adalah Dr. KH. As'ad Said Ali, KH. Abdul Mun'im DZ, K.H. Syaifuddin Amsir, dan Drs. Adnan Anwar (Mun'im and Damasky 2018).

Dalam forum yang dihadiri perwakilan ulama dari berbagai faksi, suku, provinsi (Kabul, Nangarhar, Badakhshan, Heart, Kunar, Laghman, Logar, maidan, Wardak, Parwan, Panjshir, Kunduz, dan Paktia) NU fokus terhadap pengenalan konsep moderat dalam bernegara serta betapa pentingnya bersikap proporsional, konsep bertoleransi, dan konsep *ukhuwah*. Upaya lainnya dari NU adalah dengan menyoroti pemahaman yang berbeda dan lebih luas tentang ide jihad, bahwa jihad tidak boleh diartikan secara terbatas sebagai pergi untuk berperang secara fisik demi Islam, tetapi dapat juga diartikan sebagai perjuangan untuk mengembangkan masyarakat, mengendalikan keserakahan, dan pentingnya prinsip keseimbangan dalam bernegara. Delegasi PBNU dalam forum mengenalkan nilai-nilai pancasila,

menyampaikan juga terkait pemanfaatan nilai spiritualitas dalam segala aspek seperti dalam berpolitik, bersosial, terkhusus pendidikan. Dengan semakin baiknya hubungan NU – Ulama Afghanistan kedua belah pihak kembali menghasilkan *Final Statement* berdasarkan “*Believers are brothers to each other so make peace among your brothers*” (*Sura: Alhujurat: 10*) dan juga beberapa kesepakatan seperti rencana pemberian beasiswa kepada anak-anak muda Afghanistan yang nanti dikirim ke lembaga pendidikan Indonesia, juga merencanakan kunjungan dan dialog rutin demi mewadahi perdamaian yang menjadi tujuan bersama bagi Afghanistan (Mun'im and Damasky 2018).

Dalam tahun yang sama di tanggal 17-21 September 2013, 13 pemuka agama Afghanistan termasuk Fazal Ghani Kakar (*Head of NECDO*), Maulana Qamaluddin (*Afghanistan Minister of the Taliban Regime*) berkunjung ke Indonesia untuk berdiskusi dengan NU. Dialog ini bertujuan untuk memberdayakan secara luas dan melibatkan pemuka agama Afghanistan dalam mencapai perdamaian jangka panjang. Dalam dialog ini, NU berupaya memperkenalkan nilai *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i'tidal* yang dianut NU dengan menunjukkan contoh kehidupan Islam sehari-hari serta nilai-nilai ajaran *Islam Rahmatan lil 'alamin* dalam berbangsa dan bernegara karena NU dinilai sukses menerapkan ajaran tersebut sehingga NU berperan penting dalam menciptakan perdamaian khususnya di Indonesia. Yang berbeda dalam kunjungan kali ini Ulama dari Afghanistan di agendakan tidak hanya ke Jakarta tetapi juga dijadwalkan ke Yogyakarta untuk ke UGM dan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, setelah itu Surabaya untuk berkunjung ke kantor PWNNU Jawa Timur (Mun'im and Damasky 2018). Diharapkan setelah kunjungan tersebut dapat tercipta organisasi yang dapat



mewadahi aspirasi dengan tujuan perdamaian seperti yang NU terapkan di Indonesia.

### 3.1.1 Berdirinya Nahdlatul 'Ulama Afghanistan tahun 2014

5 Mei 2014 menjadi momen bersejarah bagi NU, pasalnya pemuka agama Afghanistan yang juga berafiliasi dengan Taliban sepakat untuk mendirikan Nahdlatul 'Ulama Afghanistan (NUA), dengan mengadopsi nilai-nilai NU Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor NECDO yang berlokasi di ibukota Kabul, berdirinya NUA tidak lepas dari hubungan baik yang terjalin antara NU – Ulama Afghanistan dalam pertemuan tahun 2013 memang disepakati bahwa harus ada organisasi yang dapat mewadahi misi perdamaian Afghanistan, langkah kerjasama berjalan sangat baik sejak tahun 2011 dan Ulama Afghanistan sangat tertarik dengan ajaran Islam *Rahmatan lil 'alamin* yang dikenalkan oleh NU dimulai saat itu juga Ulama Afghanistan terus belajar untuk mengadopsi nilai-nilai keIslaman NU *tasamuh, tawazun, tawassuth*, dan *i'tidal* untuk diterapkan di Afghanistan. Berbagai perwakilan hadir dalam pertemuan NU – Ulama Afghanistan 20 tokoh berpengaruh terlibat dalam forum tersebut di antaranya adalah yang memiliki hubungan dengan Taliban, masing masing berasal dari Kota Kabul, Provinsi Jalalabad, Provinsi Pansjir, Provinsi Logar, Provinsi Paghman, Provinsi Maidan Wardak, Provinsi Parwan (Mun'im and Damasky 2018).

Setelah disepakati berdirinya NUA yang mengadopsi nilai NU, yaitu pentingnya bersikap toleransi, moderat, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan anti terhadap radikalisme hingga kekerasan diharapkan dapat menyudahi konflik suku di Afghanistan yang berkepanjangan tersebut. Forum tersebut

menghasilkan keputusan bersama antara NU Indonesia dengan Ulama Afghanistan, antara lain berisi membentuk Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan yang disingkat dengan NUA, dengan merujuk pada Nahdlatul ‘Ulama Indonesia dengan menerapkan lima prinsip Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, Adalah dan Musyarakah, NUA tidak terlibat dalam dinamika politik, perumusan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, membangaun stasiun Radio hingga pembuatan logo NUA (Mun'im and Damasky 2018).

Berikut adalah 20 tokoh Afghanistan yang terlibat dalam forum pembentukan NUA pada tahun 2014.

**Tabel 1. Delegasi Forum Pembentukan NUA 2014**

NO.	NAMA	DELEGASI/UTUSAN
1.	Q. Waqad	<i>Pakar Narasumber</i>
2.	Ab. Hakim Munib	<i>Pakar Narasumber</i>
3.	Dr. Ayaz Neyazi	<i>Pakar Narasumber</i>
4.	Muhammad Shafiq Samim	<i>Pakar Narasumber</i>
5.	Pir Muhammad Rohani	<i>Pakar Narasumber</i>
6.	Qalamuddin Qalam	<i>Pakar Narasumber</i>
7.	Muhammad Shafia Narestani	<i>Pakar Narasumber</i>
8.	Mohd Ahsan Saiqal	<i>Kabul</i>
9.	Azizul Rahman Sediqi	<i>Maidan Wardak</i>
10.	Said Salahuddin Hasemi	<i>Kabul</i>
11.	Ahmad Noor Waqif	<i>Kabul</i>
12.	Muhd Sarwar Tawhidi	<i>Ghani</i>
13.	Ahmad Gul Delawar	<i>Kabul</i>

14.	Dr. Mohd Sulaiman	<i>Logar</i>
15.	Mohd Rafiq Rohani	<i>Kabul</i>
16.	Nik Muhammad	<i>Laghman</i>
17.	Fazel Hussain Tawasoli	<i>Maidan Wardak</i>
18.	Qari Nesar Ahmad	<i>Maidan Wardak</i>
19.	Mohd Sarwar Sarwari	<i>Laghman</i>
20.	Mohd Ayaz Turnak	<i>Zabul</i>

**Sumber: Diplomasi Jalur Kedua Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan 2018 (Mun'im and Damasky 2018).**

Forum pembentukan NUA juga membahas struktur kepengurusan dan yang dipilih adalah Dr. Azizirrahman Shiddiqi, tidak lain tujuan dari pembentukan NUA adalah sebagai organisasi yang mewadahi misi perdamaian Afghanistan dengan dimensi yang luas dimulai kalangan masyarakat sampai kalangan ulama dari berbagai kelompok dan suku, untuk sama-sama meningkatkan kualitas bernegara yang baik dalam aspek persatuan dan kesatuan hingga pendidikan. NUA adalah wadah persatuan Ulama Afghanistan yang hadir sebagai pembaharu dalam misi perdamaian, yang sebelumnya Ulama Afghanistan terbelah dalam beberapa lapisan karena perbedaan faksi politik, suku, madzhab, dan kepentingan. Dengan lahirnya NUA tokoh-tokoh agama Afghanistan dapat duduk bersama dalam upaya merumuskan perdamaian dalam konflik Afghanistan yang berkepanjangan, perbedaan dan kesenggangan masyarakat Afghanistan dapat diredam dengan hadirnya NUA (Mun'im and Damasky 2018).

NUA dalam perkembangannya disambut sangat positif banyak media meliput baik skala lokal hingga nasional, dengan berdirinya NUA ini adalah upaya strategis dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan karena NUA menggunakan pendekatan sosial keagamaan tidak ada kepentingan politik, organisasi ini murni untuk melayani masyarakat yang tujuannya membawa perubahan dengan mengenalkan pentingnya persatuan dalam bernegara, jaringan yang dibangun oleh NU – NUA juga tersebar luas di Afghanistan sehingga komunikasi antar kelompok yang mempunyai riwayat konflik sudah semakin mudah terjalin, diharapkan hubungan baik tersebut dapat dirawat dengan baik untuk *investasi* perdamaian di masa yang akan datang (Mun'im and Damasky 2018)

Dalam forum pendiriannya NUA hanya didukung oleh 12 Provinsi namun dapat menjangkau hingga berkembang di 22 provinsi dalam waktu yang singkat, berselang dua tahun terjadi pertumbuhan pesat dengan bertambahnya 22 cabang NUA, serta 6000 pemuka agama setempat sebagai anggotanya. Hubungan NU dengan Afghanistan semakin diperkuat dengan didirikannya Indonesia Islamic Center (IIC). padahal situasi di Afghanistan saat itu belum baik masih sering terjadi konflik dan ketegangan sehingga rasa kepercayaan terhadap sesuatu yang baru itu suli karena masyarakat Afghanistan menaru rasa kecurigaan yang tinggi, tetapi gerakan yang dibawa NU mendapat respon positif dari tokoh agama lokal Afghanistan, sehingga kelompok kelompok yang terlibat dalam konflik dapat duduk bersama (Mun'im and Damasky 2018).

Dalam forum pendirian NUA tersebut menghasilkan *release forum* berisi:

***RELEASE FORUM NU– NUA – KNAHR 2014***

1. Nahdlatul Ulama ‘Afghanistan menolak segala macam diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.
2. NUA akan bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan yang selama ini mengalami diskriminasi dan kekerasan.
3. Membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.
4. Pemberian kesempatan ini harus tetap sesuai dengan prinsip syariah dan adat istiadat yang berlaku di Masyarakat
5. Masukan dan pandangan para Ulama Indonesia menjadi rujukan dalam masalah ini. Karena masyarakat Indonesia telah mampu menjalankan prinsip ini.

**Sumber: Diplomasi Jalur Kedua Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan 2018 (DZ and Damasky 2018).**

### 3.1.2 *AWPFO (Afghanistan Women’s Peace and Freedom Organization) 2015*

Setelah dialog pada tahun 2014, NUA juga mengeluarkan *release* dalam forum lanjutan dimana dibahas juga terkait arah dan program NUA sebagai organisasi sosial masyarakat NUA juga fokus kepada perjuangan “*penghapusan kekerasan terhadap perempuan*”, forum dialog yang berlangsung pada 9 November 2014 tersebut NU dan NUA bekerjasama dengan KNAHR (*Karama Network of Advocacy and Human Rights*) perkumpulan advokat dan pengacara tersebut memang berfokus dalam isu kemajuan gerakan perempuan Islam, dihadirkan juga Hakim dari Mahkamah Agung setempat dan melibatkan profesor dari Fakultas Hukum Universitas Kabul (Mun'im and Damasky 2018).

Tahun 2015 berdiri Organisasi Perdamaian dan Kebebasan Wanita Afghanistan (AWPFO) menjadi bagian dari Liga Internasional Wanita untuk Perdamaian dan Kebebasan (WILPF), bersama dengan sekitar 10.000 sukarelawan, bekerja untuk menciptakan Afghanistan yang damai dan sejahtera, bebas dari perang dan kekerasan, dengan dukungan sosial. Keadilan dan kebebasan bagi semua orang. AWPFO mengadvokasi hak asasi manusia, menyatukan perempuan pembawa damai di Afghanistan dan menghubungkan mereka dengan pembawa damai di seluruh dunia melalui inisiatif multidimensi. Ini juga mendukung kesehatan mental, mata pencaharian dan keamanan bisnis milik perempuan dan pembela hak-hak perempuan sejak Taliban merebut kekuasaan (Medica Mondiale 2022).

AWPFO dalam kerjasamanya dengan NUA fokus menolak segala macam diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan, membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan NUA, organisasi AWPFO selalu dilibatkan dalam berbagai forum dan kegiatan NUA yang bekerjasama dengan NECDO, dilansir dari akun resmi Facebooknya bahwa forum NUA dan AWPFO adalah Resolusi Konferensi terkait pembukaan kembali sekolah anak perempuan yang merujuk kepada Al-Quran Surat Az-Zumar : 9, Konferensi ilmuwan pria dan wanita yang melibatkan masyarakat sipil, dan giat-giat keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad. Dalam hal ini peran perempuan selalu dilibatkan dalam upaya perdamaian di Afghanistan (WILPF Afghanistan 2022).

### 3.1.3 Dialog lanjutan Nahdlatul 'Ulama dan Taliban Jakarta 2018

Perjalanan kerjasama NU – Ulama Afghanistan sempat terhenti akibat pergantian rezim di Indonesia, dimana saat itu Joko Widodo terpilih menjadi presiden di tahun 2014. Tentu saja pada masa transisi tersebut kebijakan arah diplomasi Indonesia turut berubah, namun perkembangan NUA di Afghanistan masih terus berlanjut, hanya saja komunikasi dengan Indonesia menjadi terhambat hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan NU dan NUA dalam diplomasi perdamaian di Afghanistan. Dalam kesempatan diplomasinya pemerintah Indonesia kini menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), keputusan tersebut dianggap tidak strategis karena MUI tidak ada pengalaman di Afghanistan sedangkan NU sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan pihak Afghanistan sejak tahun 2007 dan saat dimulai forum dialog perdamaian tahun 2011 di Jakarta. NU dalam perannya di Afghanistan berdiplomasi dengan pendekatan sosial dan keagamaan, NU diterima di Afghanistan karena dianggap organisasi non-politik murni datang membawa nilai-nilai perdamaian di dasari kedekatan agama atau *ukhuwah islamiyah*. Sedangkan pemerintah Indonesia mengupayakan diplomasi dengan pola *government to government* dengan bekerjasama dengan MUI yang mana tidak melibatkan aspek kultural masyarakat Afghanistan. Tentu saja yang dilakukan Indonesia tidak mendapat respon baik di Afghanistan, perubahan pola diplomasi juga membuat masyarakat Afghanistan apatis kepada Indonesia yang seolah-olah menggunakan pendekatan politik dalam diplomasinya (As'ad 2022).

Situasi saat itu membuat NU Indonesia dan NUA mengeluhkan keputusan pemerintahan Indonesia yang tidak lagi melibatkan peran Nahdlatul ‘Ulama dalam perdamaian di Afghanistan, hubungan baik NU – Ulama Afghanistan yang sangat baik menjadi terhambat karena perubahan arah diplomasi. Saat itu perkembangan NUA sedang pesat hanya butuh kurang dari 3 tahun sudah tersebar di 22 provinsi tentu hal tersebut sangat luar biasa, ada sebuah organisasi yang mewadahi tokoh-tokoh Afghanistan yang sebelumnya terpecah bisa bersatu dalam wadah yang membawa misi perdamaian (Mun'im 2019). Hal tersebut tidak lantas membuat kerjasama NU dan NUA berhenti, upaya perdamaian tetap menjadi tujuan bersama yang harus dituntaskan, menindak lanjuti yang terjadi NU dan NUA memutuskan untuk kembali melangsungkan forum dialog. Pada dialog kali ini NU dan NUA kembali mengundang Taliban yang tujuannya untuk mewadahi aspirasi atas situasi yang telah terjadi. Taliban selalu terlibat dalam proses perdamaian yang di inisiasi NU dan NUA karena beranggapan perdamaian di Afghanistan tidak akan tercapai jika tidak melibatkan Taliban, dimana Taliban adalah kelompok terbesar dan faksi paling berpengaruh di Afghanistan (Mun'im 2019).

Taliban mempunyai beberapa faksi di dalamnya ada 2 faksi terkuat, yaitu Akhunjada dan Haqqani keduanya sama-sama besar dan memiliki pandangan berbeda tetapi NU mempunyai akses terhadap keduanya, dalam kerjasama NU – Ulama Afghanistan kedua faksi tersebut selalu dilibatkan dalam perkembangan NUA karena seringkali upaya perdamaian datang dari dunia Internasional termasuk pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil bahkan gagal karena tidak melibatkan Taliban dalam upaya perdamaianya. Atas upaya

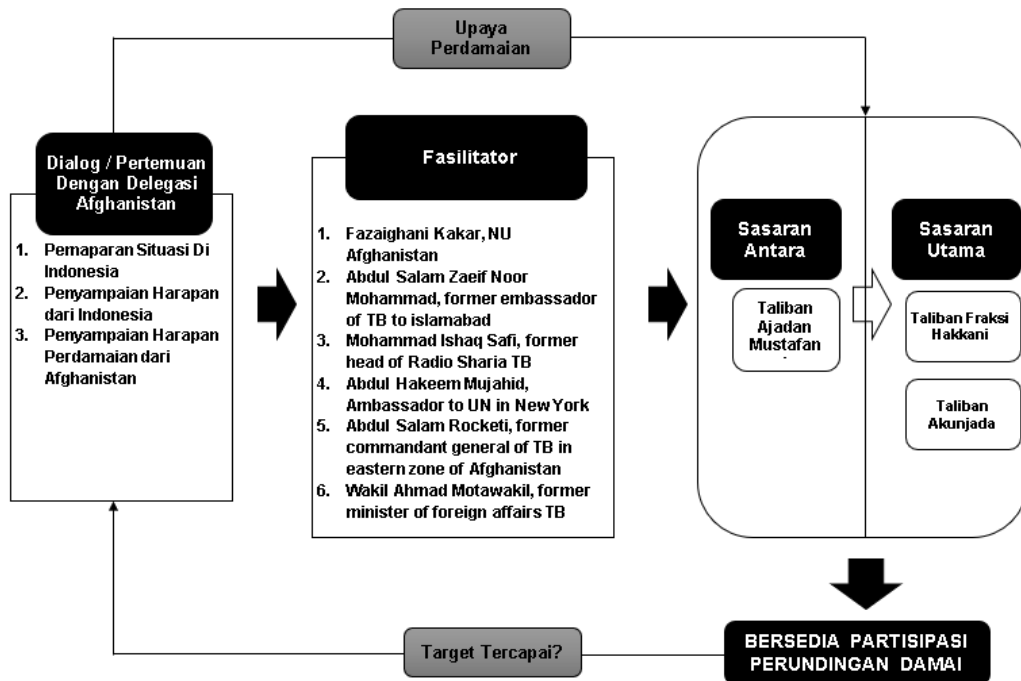


perdamaian yang dilakukan NU dan NUA dengan pendekatan kultural dan psikologi, Taliban menerima kerjasama tersebut dengan terbuka dan mempercayai bahwa yang dilakukan NU dan NUA murni tanpa politik (As'ad 2022). Merujuk pada forum dialog 2011, kedua belah pihak NU dan NUA menyusun langkah strategis, yaitu *a)* mengintensifkan silaturahmi antar pihak. *b)* melakukan internalisasi hasil silaturahmi dan sosialisasi pentingnya perdamaian. *c)* menumbuhkan sikap saling pengertian sehingga timbul sikap saling percaya. *d)* melakukan dialog lanjutan dengan melibatkan semua pihak. *e)* melakukan langkah rekonsiliasi dan rekonstruksi fisik, dengan membangun kembali berbagai sarana pendidikan, peribadatan, serta perekonomian dan kesehatan yang sebelumnya telah hancur oleh perang (Mun'im 2019).

Langkah pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan NU dan NUA bersama Taliban dipersiapkan dengan matang, PBNU juga menugaskan seorang pemuda Afghanistan bernama Daud untuk membantu forum dialog lanjutan sebagai penerjemah, Daud juga diminta PBNU untuk menerjemahkan *UUD 1945, Pancasila, dan Dasasila Bandung*. PBNU akan mengenalkan kepada Taliban bagaimana Indonesia dalam menghadapi problem sosial masyarakatnya serta posisi Indonesia dalam masalah kenegaraan, dimana hal tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut. Setelah NU Indonesia dibantu NUA melakukan pemetaan masalah di Afghanistan, Dr. Fazal Ghani Kakar mewakili NUA membantu NU Indonesia menentukan tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam forum dialog lanjutan dengan Taliban upaya ini dilakukan demi menentukan langkah-langkah yang akan dihadapi baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Dr. Fazal Ghani Kakar secara langsung

melakukan pendekatan dengan pihak Taliban baik faksi Akhunjada maupun Haqqani, pihak Taliban sangat terbuka dengan akan diadakannya forum lanjutan tersebut. Hasilnya memutuskan peserta forum dialog yang akan dilangsungkan di Jakarta 22 September 2018.

**Gambar 2. Upaya Perdamaian Afghanistan 2018**



**Sumber: Percepatan Perdamaian Afghanistan Dialog NU dengan Pemimpin Taliban (Mun'im 2019)**

Forum yang berlangsung pada 22 September 2018 berjalan sebagaimana mestinya, walaupun sempat ada ketegangan dari pihak Taliban karena rasa kecurigaan masih ada dan NU – NUA memahami hal tersebut dimana komunikasi yang terjalin sempat terhenti, forum dialog dilaksanakan dalam situasi yang serba terbuka tanpa *ceremonial* berjalan informal agar memberikan kesan yang tidak memberatkan. Forum dialog kali ini dipimpin oleh KH. As'ad Said Ali, kedatangan pimpinan Taliban sangat diapresiasi oleh peserta forum dialog baik dari NU Indonesia dan NU Afghanistan, selanjutnya diskusi

bersama perwakilan dari Indonesia mengenai sejarah Indonesia serta pengalaman dalam menghadapi konflik dan penjajahan, Indonesia adalah negara besar dengan segala keberagamannya di sisi lain Indonesia juga berhasil menciptakan kedamaian di tengah kemajemukan (Mun'im 2019).

Dalam forum diskusi, Taliban diwakili oleh Abdul Salam Zaeif Noor menyampaikan kepada forum NU – Ulama Afghanistan, bahwa posisi Indonesia dalam konflik Afghanistan ini netral, perang di Afghanistan bukan perang agama, melainkan perang politik, Afghanistan menjadi rebutan karena Afghanistan memiliki posisi geopolitik yang strategis, bahwa hingga saat ini baik pemerintah Afghanistan maupun pihak Taliban belum memiliki konsep yang jelas dalam forum ini, harus memahami situasi di Afghanistan, agar tim perdamaian bisa melangkah dengan cermat, merumuskan prinsip-prinsip perdamaian yang sistematis dan menyeluruh, agar kami semua bisa mengambil langkah lanjutan utamanya isu pendidikan dan kesehatan, untuk memudahkan masuk ke wilayah pendudukan Taliban (Mun'im 2019).

Forum tersebut menghasilkan penandatanganan MoU “*Mufakat Jakarta*” berisi:

#### **MUFAKAT JAKARTA**

***“In the Name of Allah the Most Merciful the most Beneficent”***

***MoU***

*Afghanistan Ulama (Former Taliban Prominent Figures) & NU Indonesia*

*22 September 2018 – Jakarta*

*Working for Sustainable Peace in Afghanistan*

***(Believers are brother to each other so make peace among your brothers)***

*Al-Hujurat-10*


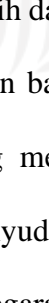


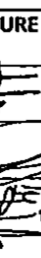

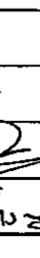

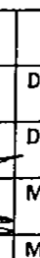
*We the Ulama from Afghanistan (Former Taliban Prominent Figures), NUA (Nahdlatul 'Ulama Afghanistan) and NUI (Nahdlatul 'Ulama Indonesia) in result of our dialogue and discussions about Peace in Afghanistan from the Perspective of former Taliban leaders and prominent figures agree to recommend the following points:*

- 1. We believe on Muslim brotherhood as a prime and crucial umbrella for building peace based on the teaching of the Holy Quran as says (Believers are brothers) Al-Hujurat-10 and the Hadith of Prophet as narrated, (Muslims are brothers to each other) Al-Hadiths*
- 2. We believe that work for sustainable peace in Afghanistan is the prime and principal need to put end to this long term conflict which affect the Afghan Muslim nation, the region as well as the Muslim Ummah in whole.*
- 3. All actors of the conflict must be represented, this will prevail a sphere of understanding and change of anti-Peace mentality.*
- 4. The mediator should build trust between the actors of the conflict by remaining neutral during whole the peace making process.*
- 5. The work for peace should be Step by Step process due the cause that the conflict in Afghanistan has its deep roots and various dimensions.*
- 6. To reach a durable and sustainable peace it's highly recommended to adopt both cultural and political approaches for making a durable peace.*
- 7. The mediator should ensure to take careful steps considering the local, regional and international rapid changes and developments in this regard.*

8. *We highly recommend that next step should be taken as soon as possible, an informal meeting with the medium or top level leadership of the Taliban.*

9. *We recommend the internal consolidation to be given priority in order to mobilize the mass youths, Ulama, CSOs, intellectuals, tribal leaders, activist, peace maker individuals and institutions, government bodies to work together for durable peace in the country.*

**Sumber: Percepatan Perdamaian Afghanistan Dialog NU dengan Pemimpin Taliban (Mun'im 2019).**

AFGHAN ULAMA	SIGNATURE	NU INDONESIA	SIGNATURE
Mawlawi Wakil Ahmad Motawakil		Dr. Asad Said Ali	
Mawlawi Abdussalam Zaeif		Dr. Ichsan Malik	
Mawlawi Abdussalam Rocketi		Mr. Abdul Mun'im DZ	
Mawlawi M. Ishaq Nezami		Mr. Ubaidullah Shodaqoh	
Fazal Ghani Kakar			

**Gambar 3. Tanda Tangan Mou Mufakat Jakarta**

### 3.1.4 *Dinamika perkembangan Nahdlatul 'Ulama Afghanistan 2019*

Konflik yang terjadi di Afghanistan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hingga lebih dari 40 tahun dan konflik tak kunjung mereda. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya aktor, baik itu dari aktor negara ataupun aktor non-negara yang memberikan kontribusi mereka terhadap konflik di Afghanistan untuk menyudahi dan membangun perdamaian di negara tersebut. Salah satu aktor non-negara yang terlibat di dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan adalah Nahdlatul 'Ulama (NU). NU dapat dikatakan memiliki

kemampuan serta pengalaman yang mumpuni, maka dari itu, NU berusaha untuk berperan di dalam proses untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh NU, di mana upaya NU tidak hanya sebatas menciptakan kesepakatan serta berdialog dengan pihak yang terlibat di dalam konflik, namun NU juga menerapkan prinsip *Islam Rahmatan lil'alamin* yang telah ditawarkan selama ini untuk menjadi sebuah karakter yang ditanam di dalam tubuhnya guna sebagai sebuah hasil nyata dalam keberhasilan membangun masyarakat yang menjunjung perdamaian serta toleransi. Namun tentu saja, di dalam memperjuangkan perdamaian dalam suatu konflik, terdapat tantangan dan juga peluang yang harus dihadapi, hal ini juga dialami oleh NU ketika NU berupaya untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan.

NU memiliki jumlah pengikut yang lebih dari 80 juta jiwa, di mana hal ini membuat NU kemudian menjadi salah satu aktor-non negara yang perlu untuk diperhitungkan (Ridwan 2008). Jika melihat sepak terjang NU di dalam memperjuangkan perdamaian di Afghanistan, maka dapat dikatakan bahwa NU merupakan salah satu aktor non-negara yang memiliki peluang yang sangat baik, hal ini sendiri diamati dari proses perdamaian berkelanjutan. Jika membahas peluang yang dimiliki oleh NU di dalam memperjuangkan perdamaian di Afghanistan, maka ada beberapa faktor yang dapat diperhitungkan.

Faktor yang pertama adalah, NU dan posisinya sebagai aktor non-negara. NU sendiri dikenal oleh khalayak luas sebagai sebuah badan independen, di mana NU tidak terlibat dengan kepentingan politik yang ada. Sehingga, hal ini yang kemudian memudahkan NU untuk mudah untuk diterima oleh lapisan

elemen yang terdapat di dalam konflik (Pemerintah Afghanistan, para tokoh masyarakat dan ulama, kelompok radikal, serta masyarakat umum). Pemerintah Afghanistan memiliki kepercayaan bahwa NU memiliki niat yang tinggi di dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan, hal ini terbukti dari peran yang dijalankan oleh NU di Afghanistan dalam rangka menciptakan perdamaian (Mun'im 2019).

Kedua, faktor yang melatarbelakangi peluang yang dimiliki oleh NU adalah, NU merupakan sebuah organisasi yang bergerak di dalam bidang keagamaan. Sebagaimana yang selama ini diketahui bahwa Islam mengajarkan pengikutnya untuk selalu berusaha di dalam menjaga dan mengusahakan perdamaian, mempertahankan kerukunan serta kasih sayang terhadap seluruh umat manusia. Ikatan kuat yang membuat peluang NU besar di Afghanistan adalah, NU merupakan organisasi keagamaan Islam, sementara Afghanistan merupakan negara Islam. Kesamaan ini kemudian dimanfaatkan oleh NU untuk memperjuangkan perdamaian di Afghanistan (Faizin 2020).

Ketiga, cara yang ditempuh oleh NU. NU menggunakan mediasi fasilitatif, yang mana ini melibatkan peran *enskiller*. Upaya NU tidak hanya sekedar menciptakan dialog antara pihak yang terlibat, melainkan NU juga mengupayakan untuk memberikan pengetahuan dan ilmu terkait dengan kerukunan dalam beragama serta bangsa melalui khazanah Islam moderat *ahlussunnah wal jama'ah* yang disampaikan oleh NU. Ulama-ulama di Afghanistan mempercayai bahwa hanya NU yang mampu untuk memperbaiki akhlak masyarakat Afghanistan yang dapat dikatakan telah rusak dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dibawa oleh NU (Faizin 2020). Pendekatan

yang ditempuh oleh NU sejak awal telah berhasil menumbuhkan kepercayaan di seluruh kalangan, sehingga mereka mau duduk bersama dan melakukan dialog dengan tujuan untuk membangun kerjasama untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Bagaimana NU yang menerapkan pendekatan kultural sebagai perwujudan dari khazanah Islam moderat juga menjadi aspek peluang bagi NU di dalam menciptakan serta mengupayakan perdamaian di Afghanistan (Mun'im 2019).

Keempat, adanya aspek historis serta pengalaman. NU telah lahir jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, sehingga NU telah banyak melewati berbagai macam kejadian serta peristiwa. NU juga berperan di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana perannya mampu menggerakkan umat Islam di dalam melawan penjajah kala itu. Dengan pengalaman selama puluhan tahun bahkan mungkin hampir seratus tahun, tentunya NU mempunyai bekal yang cukup di dalam upayanya dalam proses perdamaian di Afghanistan. NU bukanlah pemain baru di dalam upaya perdamaian, sehingga apa yang NU upayakan tidak dapat dipandang sebelah mata (Faizin 2020).

Setelah menyebutkan empat peluang yang dimiliki oleh NU dalam proses menciptakan perdamaian di Afghanistan, NU juga memiliki tantangan yang menghadang pihaknya di Afghanistan. Hal yang tak bisa dipungkiri adalah, NU merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang mana, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam melibatkan diri terkait dengan proses perdamaian di Afghanistan. Namun, ketika rezim pemerintahan Indonesia berganti di tahun 2014, pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan



NU di dalam misi perdamaian ini. Sehingga kemudian, semua upaya yang telah dilakukan oleh NU sejak awal mengalami hambatan. Salah satu hambatannya adalah kekurangan pendanaan yang berdampak kepada terhentinya program pembangunan *Islamic Center* yang di inisiasi oleh NU Indonesia di dalamnya terdiri dari masjid, fasilitas kesehatan, asrama, serta tempat untuk menyambut tamu (Mun'im 2019).

Terputusnya kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan NU kemudian berdampak kepada upaya pemerintah Indonesia yang menjadi tidak maksimal, sebab pemerintah Indonesia tidak dapat menyentuh inti persoalan dari konflik serta tidak adanya legitimasi dari tokoh Taliban. Kompleksitas di dalam konflik Afghanistan yang melibatkan tidak hanya pihak internal di dalam negeri juga menjadi tantangan bagi NU dalam mengusahakan perdamaian di Afghanistan. Tantangan terbesar NU di dalam memperjuangkan perdamaian di Afghanistan adalah, kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia, karena dalam menghadapi konflik Afghanistan ini, perlu dilakukannya *high politic diplomacy*, yang mana ini bukanlah kapasitas NU untuk menjalankannya (Faizin 2020).

Banyaknya aktor eksternal Afghanistan yang terlibat juga menjadi tantangan NUA dalam perkembangannya, salah satunya Amerika Serikat pada saat melakukan penarikan pasukannya dari Afghanistan yang membuat konflik suku disana semakin kompleks. Sebelumnya pasukan Amerika Serikat bermukim di Afghanistan sebagai upaya untuk menghapuskan rezim Taliban, di mana Taliban sendiri memiliki andil yang sangat besar dalam semua konflik internal yang terjadi di Afghanistan (Nainggolan 2021). Sedangkan NUA

mempunyai komunikasi yang baik dengan pihak Taliban dalam upaya perdamaian di Afghanistan, ketika 2018 Taliban dilibatkan dalam forum dialog di Jakarta. Dalam forum tersebut Taliban menaruh kecurigaan kepada NU Indonesia dan NU Afghanistan karena mereka masih memiliki ketegangan dengan pihak eksternal yang terlibat dalam konflik di Afghanistan.

### **3.2. *Faith-Based diplomacy* Nahdlatul ‘Ulama di Afghanistan**

Dalam beberapa situasi diplomasi berbasis agama memang sangat tepat. Pertama, dalam situasi konflik dimana agama merupakan faktor penting dalam identitas salah satu atau kedua komunitas atau ketika iman dan politik tidak dapat dipisahkan dalam suatu kelompok yang berkonflik. Dalam kondisi yang demikian, para diplomat agama yang beroperasi perlu mengintegrasikan konsep-konsep politik dengan nilai-nilai keagamaan guna mengembangkan solusi untuk masalah tersebut. Kedua, dalam situasi konflik di mana para pemimpin agama dapat dimobilisasi untuk memfasilitasi perdamaian. Untuk mencapai perdamaian dalam suatu konflik, beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan para pemimpin agama dalam proses perdamaian (dalam setiap konflik di mana agama merupakan faktor penting sehingga memberi para pemimpin agama *a sense of belonging* dalam proses perdamaian dan mendapat dukungan masyarakat), memberikan kebebasan bergerak bagi para pemuka agama untuk menjalankan tugasnya di wilayah konflik, melindungi tempat-tempat suci di kedua sisi dari kehancuran atau penodaan. Ketiga, situasi kerenggangan yang berkepanjangan antara dua tradisi agama besar dalam konflik yang melampaui batas-batas negara. Sebagian besar konflik dengan karakteristik seperti ini melibatkan agama Kristen

dan Islam. Dalam sejarah dan bahkan di dunia kontemporer telah banyak terjadi permusuhan, kesalahpahaman, dan sikap tidak hormat di antara kedua agama ini. Keempat, mediasi pihak ketiga dalam konflik di mana tidak ada dimensi agama tertentu. Mereka tidak membawa agenda politik, hanya kepedulian mereka terhadap penderitaan manusia yang terlibat. Terakhir yang kelima, Situasi di mana kekuatan politik telah menyebabkan kerugian yang berkepanjangan untuk masyarakat sehingga pemimpin agama merasa terpanggil untuk membuka dialog intervensi demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat kedepannya (Monge 2003).

Secara spesifik terdapat 3 konsep *Peacemaking* dalam *Faith-Based diplomacy* pertama menawarkan visi baru yang mendorong para pihak untuk menciptakan keadaan dan hubungan baru satu sama lain, kedua membangun jembatan antara konflik dan prinsip agama untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi secara lebih efektif, ketiga pemulihan konflik melalui mediasi untuk tujuan mengakhiri permusuhan, peneliti melihat ini sangat relevan dengan yang NU terapkan di Afghanistan guna menyelesaikan masalah yang mendasari konflik dan untuk memulihkan hubungan pihak yang berkonflik.

### 3.2.1 *A New Vision*

Visi baru yang ditawarkan NU adalah spirit dan nilai-nilai Islam Nusantara, Islam Nusantara hadir membawa rupa yang berbeda, tetapi sejatinya ruh Islam hanya satu *Rahmatan lil 'alamin*. Islam tetaplah ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diterapkan Nabi Muhammad Saw yang kemudian dipraktekkan untuk nantinya diikuti oleh umatnya, Islam Nusantara muncul bukan untuk mengubah konsep tersebut, Islam Nusantara mengkonsepkan Islam kedalam sistem nilai, teologi, dan fiqih ubudiyah yang berpengaruh

terhadap budaya Indonesia dengan karakteristik tertentu. Islam Nusantara bukanlah aliran, Islam Nusantara adalah *culture* atau budaya dimana Islam itu berkembang, menjunjung tinggi persatuan dengan menjadikan budaya sebagai pondasi agama, saling menghargai dan saling menghormati adalah kata kunci (Luthfi 2016).

Dengan hadirnya NU yang sudah menyebar hampir di seluruh provinsi, NU melalui NUA bisa menawarkan perdamaian, mengajak hidup yang rukun, karena Afghanistan mengambil konsep *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i'tidal* dan menjadi prinsip mereka demi menghindari konflik berdarah-darah, bahkan banyak kelompok Taliban yang akhirnya pindah ke NU di daerah-daerah, karena ini ada ajaran baru yang mengajak pada perdamaian, itu menarik untuk masyarakat Afghanistan, karena sebenarnya masyarakat Afghanistan sudah bosan dengan situasi perang, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa berkegiatan dengan semestinya, akhirnya begitu NU datang disambut dengan positif bahkan dalam waktu singkat di seluruh provinsi sudah berkembang, seperti dalam situasi revolusi seperti saat ini, yang banyak berperan di Afghanistan justru NU karena Taliban tidak menguasai pendidikan. Menurut KH. Mun'im DZ itulah cita cita Islam Nusantara, bukan Islam Nusantara dijadikan pola dunia, tetapi Islam sesuai dengan karakter masing-masing. Indonesia sebagai negara Islam yang besar dan damai, itu menjadi impian Afghanistan seperti Indonesia, ketika ulama Afghanistan ke Indonesia mereka terbuka dan sangat senang, ternyata ada negara Islam yang besar maju tetapi damai dan moderat (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

### 3.2.2 *Building Bridges*

Membangun jembatan antara konflik dan prinsip agama untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi secara lebih efektif yang mau bekerjasama untuk perdamaian (Monge 2003). NU merasa solider dengan sesama dunia Islam yang sudah menghadapi situasi perang bertahun-tahun dalam studi kasus ini adalah Afghanistan, ketika NU diminta bantuan pemerintah Indonesia tidak semata-mata NU hanya membantu pemerintah Indonesia tetapi karena solidaritas sesama dunia Islam, Afghanistan sudah mengalami kesengsaraan karena perang yang berlarut-larut, NU menilai hal tersebut sebagai bentuk *ukhuwah islamiyah*, Islam Indonesia khususnya NU mempunyai kedekatan dengan Afghanistan karena kedekatan itulah NU siap untuk terlibat dalam upaya perdamaian di Afghanistan salah satunya karena punya pemahaman keagamaan yang sama sehingga itu bisa menjadi modal NU untuk bisa mengakses perdamaian di Afghanistan. Sejatinnya prinsip keagamaan Islam adalah *Rahmatan lil 'alamin* namun NU mempunyai pijakan dalam penanaman nilai keIslaman, konsep trilogi *ukhuwah* atau persaudaraan serta kemanusiaan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan ikatan kebangsaan), *ukhuwah basyariah* (persaudaraan umat manusia) (Purwono 2013).

Prinsip keIslaman tersebut tentu saja yang menemukan benang merah antara konflik dan prinsip agama, dalam hasil pertemuan dialog pertama di tahun 2011 NU – Ulama Afghanistan menghasilkan *release joint statement* berjumlah 9 poin yang diantaranya berisi *To affirm the principle of Islam as religion of compassion “Rahmatan lil ‘alamin” which upholds the principle of good*

*morality (al-akhlaq alkarimah), Muslim brotherhood (ukhwwah islamiyah), and the principles of being moderate (tawassuth), balanced (tawazun), tolerance (tasamuh) and just (i'tidal)* (Mun'im and Damasky 2018).

NU juga mempunyai kedekatan spiritual dan keagamaan dengan Ulama Afghanistan. NU dan Taliban sama-sama Sunni, hanya berbeda Madzhab NU adalah Syafii dan Taliban adalah Hanafi, Taliban juga rata-rata pengikut tarekat tasawuf, atas dasar kedekatan itulah yang membuat NU mudah komunikasi (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

### 3.2.3 *Healing Conflict*

Pemulihan konflik, biasanya melalui mediasi. Pemulihan konflik ini bertujuan untuk mengakhiri permusuhan, menyelesaikan masalah yang mendasari konflik, dan untuk memulihkan hubungan pihak yang berkonflik (Monge 2003). Selain dari beberapa kunjungan dan dialog yang dilakukan NU – Ulama Afghanistan dimulai tahun 2011 sebagai dialog pembuka yang menghasilkan 9 poin *joint statement* hingga melahirkan NUA di tahun 2014 sebagai wadah pemersatu Ulama Afghanistan dengan banyak kesepakatan demi membangun perdamaian serta persatuan dan selanjutnya dialog penguatan antara NU – Taliban di tahun 2018 bertempat di Jakarta yang menghasilkan MoU mufakat Jakarta, hal tersebut sebagai bentuk pemulihan konflik serta upaya mediasi yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan (Mun'im 2019). Dalam wawancara penulis dengan KH. As'ad Said Ali dan KH. Mun'im DZ bahwa NU melakukan langkah-langkah mediasi antar kelompok dan faksi-faksi yang terlibat dalam konflik di Afghanistan, selanjutnya pengurus PBNU rutin melakukan kunjungan ke Afghanistan dan ketika melakukan kunjungan

pertama delegasi dari PBNU keliling ke beberapa provinsi di Afghanistan bersamaan dengan menemui tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda faksi politik.

NU berhasil bertemu dengan kelompok Ahmad Shah Massoud, kelompok Abdul Rasul Sayyaf, kelompok Aliansi Utara, Aliansi Selatan dan tentunya kelompok Taliban setelah itu NU mencoba mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut yang saat itu dibantu oleh mantan presiden Burhanuddin Rabbani, bertemulah tokoh dari faksi-faksi tersebut mereka tertarik karena ada simbol Burhanuddin Rabbani yang saat itu menjadi pimpinan *high peace council* (lembaga perdamaian tertinggi). Dari kunjungan tersebutlah yang akhirnya menjadi cikal bakal dialog NU – Ulama Afghanistan di Indonesia pada 18 Juli 2011, Burhanuddin Rabbani sebagai kepala rombongan bersama dengan 20 tokoh Ulama Afghanistan. Setelah kunjungan tersebut jalinan NU – Ulama Afghanistan menjadi kuat dan berkelanjutan hingga berdirinya NUA tahun 2014, semenjak saat itu Taliban selalu koordinasi dengan PBNU dilain sisi NUA terus berkembang hampir ke seluruh provinsi di Afghanistan sehingga komunikasi antara NU – Ulama Afghanistan lebih terbuka sebagai upaya mediasi dan pemulihan konflik. NU adalah organisasi keagamaan non politik, NU sebagai aktor yang menjembatani antar faksi seperti faksi Ahmad Shah Massoud dengan faksi Abdul Rasul Sayyaf yang dahulu bertentangan saat itu berhasil dijembatani oleh NU untuk kemudian rukun (Mun'im, Nahdlatul Ulama Afghanistan 2022).

NUA adalah wadah persatuan Ulama Afghanistan yang hadir sebagai pembaharu dalam misi perdamaian, yang sebelumnya Ulama Afghanistan

terbelah dalam beberapa lapisan karena perbedaan faksi politik, suku, madzhab, dan kepentingan. Dengan lahirnya NUA tokoh-tokoh agama Afghanistan dapat duduk bersama dalam upaya merumuskan perdamaian dalam konflik Afghanistan yang berkepanjangan, perbedaan dan kesenggangan masyarakat Afghanistan dapat diredam dengan hadirnya NUA (Mun'im and Damasky 2018). KH. Mun'im DZ mengatakan “akhirnya sudah tidak ada konflik di bawah, konfliknya di tingkat atas saja, rebutan kekuasaan, grassroot nya sudah di tata”.





## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Konflik suku di Afghanistan telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan ketika Uni Soviet mundur dari Afghanistan, perang suku di Afghanistan masih berlanjut dalam waktu yang lama dan menelan banyak korban. Rezim pemerintah di Afghanistan sendiri merasa kewalahan untuk menghadapi pemberontakan yang terus berlangsung di sana, sehingga kemudian konflik suku di Afghanistan semakin bertambah parah dan sulitnya untuk mencapai kesepakatan damai di antara para suku yang berkonflik. Dengan adanya Amerika Serikat di Afghanistan semakin memperparah konflik yang telah terjadi di sana, dan konflik suku di Afghanistan kembali menguat ketika Presiden Amerika Serikat George W. Bush melepaskan serangan rudal yang pertama pada bulan Oktober 2001.

Kondisi di Afghanistan luluh lantak dan dipenuhi dengan konflik antar suku yang terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, bantuan dari pihak eksternal sangat diperlukan untuk mengupayakan perdamaian di Afghanistan. Namun, Afghanistan tidak menerima sembarang pihak untuk diizinkan masuk dan melakukan mediasi dengan suku-suku yang berkonflik. Salah satu pihak eksternal yang diizinkan oleh Afghanistan untuk menjadi mediator adalah Nahdlatul 'Ulama (NU), yang merupakan organisasi keagamaan, dimana NU telah berdiri sejak tahun 1926. Hal yang membuat para ulama di Afghanistan tertarik untuk melakukan konsultasi terkait dengan konflik berkepanjangan yang telah terjadi di Afghanistan dalam beberapa dekade terakhir adalah karena sikap moderat NU dalam menghadapi isu-isu keagamaan. Dengan demikian, NU mulai mengupayakan

perdamaian di Afghanistan yang ditempuh dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan mendirikan forum dialog yang diberi nama “Forum Konsultasi untuk Perdamaian di Afghanistan.” Forum ini membahas mengenai ide dan solusi yang sekiranya dapat diterapkan untuk menyudahi konflik berkepanjangan yang berlangsung di Afghanistan. Kemudian didorong langkah diplomasi yang disebut sebagai *Faith-Based diplomacy* NU. Bahkan, NU berhasil membentuk Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan (NUA) pada tahun 2014 dan terus berkembang hingga 22 provinsi sampai 2019.

Apa yang NU lakukan di Afghanistan adalah bentuk dari perjuangan untuk perdamaian global, di mana NU mengampanyekan nilai-nilai Islam *Rahmatan lil’ alamin* dengan konsep *tasamuh*, *tawazun*, *tawassuth*, dan *i’tidal* di Afghanistan. NU benar-benar serius di dalam menjalankan perannya sebagai pihak ketiga yang mengusahakan perdamaian di Afghanistan, Bahkan ketika diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk NU membantu Afghanistan, NU mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus mempercayai langkah yang ditempuh oleh NU. Forum-forum diskusi berlangsung dengan baik dengan berhasil mempertemukan tokoh-tokoh agama berpengaruh di Afghanistan, di mana forum ini kemudian menghasilkan pernyataan akhir yang akan merujuk kepada perdamaian. Hambatan NU dalam mengupayakan perdamaian salah satunya datang dari Pemerintah Indonesia.

Perjalanan kerjasama antara NU – Ulama Afghanistan sempat terhenti akibat adanya pergantian rezim di Indonesia, yang mana hal ini mengakibatkan arah diplomasi Indonesia juga berubah. Hubungan NU di Afghanistan masih berlanjut, namun mengalami kendala komunikasi dengan Indonesia, karena pihak pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan NU dan NUA di dalam diplomasi perdamaian di

Afghanistan. Pemerintah Indonesia sempat menjalankan strategi yang tidak strategis dengan menggandeng MUI yang tidak memiliki pengalaman seperti apa yang NU miliki. NU secara pasti tidak lagi dilibatkan oleh pemerintah di dalam aksi perdamaian di Afghanistan, dan ini tentu saja menghambat semua upaya yang telah diusahakan oleh NU terkait dengan perdamaian di Afghanistan.

Meskipun demikian, hubungan NU dan NUA tidak berhenti hanya karena pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan NU. NU dan NUA memutuskan untuk kembali mengadakan forum untuk membahas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. NU mempunyai akses terhadap faksi di Taliban. Dan dengan adanya akses ini membuat NU selalu dilibatkan dalam perkembangan NUA untuk upaya perdamaian.

*Faith-Based diplomacy* yang dijalankan oleh NU menunjukkan respon yang positif, dan meskipun sempat ada hambatan karena pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan NU di dalam upaya perdamaian di Afghanistan, hal itu tidak serta-merta membuat NU berhenti untuk memperjuangkan tujuan perdamaianya di Afghanistan. Dibuktikan dengan pertemuan yang berkelanjutan, membangun jembatan dalam penyampaian aspirasi kelompok untuk perdamaian, dan pemulihan konflik sebagai langkah mediasi konflik. Juga pemberian beasiswa kepada anak-anak muda di Afghanistan demi mengembangkan moderasi Islam di Afghanistan dan memupuk sikap toleran sejak dini. Apa yang NU lakukan di Afghanistan tidak terikat dengan kepentingan politik manapun, melainkan untuk mengupayakan perdamaian dari aktor non-negara dengan mengutamakan perdamaian yang ada dalam nilai Islam *Rahmatan lil 'Alamin* yang dikampanyekan oleh NU.

## 4.2. Rekomendasi

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Faith-Based Diplomacy* Nahdlatul ‘Ulama Dalam Konflik Suku Di Afghanistan (2014-2019)”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menganalisa isu tersebut, keterbatasan sumber data dalam penelitian ini dapat menjadi catatan penting untuk peneliti selanjutnya, sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih sempurna dalam menganalisa peran Nahdlatul ‘Ulama dalam konflik di Afghanistan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan penulis sebenarnya dapat dikembangkan lagi dengan jangkauan yang lebih luas seperti aspek ekonomi, politik, dan respon dunia.

Topik penelitian ini pastinya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu seperti dalam masa transisi sekarang dimana Taliban berhasil menggulingkan pemerintah resmi Afghanistan, ketegangan kembali terjadi di Afghanistan setelah lumpuhnya perekonomian ketika Amerika Serikat menutup akses aset ekonomi Afghanistan, krisis ekonomi terjadi akibat gaya kepemimpinan Taliban yang tertutup. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sisi yang berbeda dalam metode, teori, atau konsep sehingga menghasilkan penelitian yang dapat menjangkau lebih luas terkait peran Nahdlatul ‘Ulama dalam konflik di Afghanistan. Untuk mengetahui *update* Nahdlatul ‘Ulama Afghanistan dapat diakses melalui laman Facebook [www.facebook.com/nu.afghanistan](https://www.facebook.com/nu.afghanistan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Bibliography

Ahmad, Fathoni. *Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama*. 31 Januari 2020.

<https://www.nu.or.id/post/read/116035/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama>.

Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.

As'ad, Dr. Said Ali, interview by Muhammad Asyrof Abdik. *Nahdlatul Ulama Afghanistan* (5 July 2022).

Barak, Hariz. *27-9-1996: Kabul Jatuh ke Tangan Taliban, Awali Rezim Baru di Afghanistan*. 27 September 2020.  
<https://www.liputan6.com/global/read/4366464/27-9-1996-kabul-jatuh-ke-tangan-taliban-awali-rezim-baru-di-afghanistan>.

Beta Arif Muhammad, Najamuddin Khairur Rijal, Gonda Yumitro. "The Roles of International Conference of Islamic Scholar (ICIS)." *International Institute for Science, Technology & Education (IISTE)*, 2018.

Bloch, Hannah. *A Look At Afghanistan's 40 Years of Crisis - From The Soviet War To Taliban Recapture*. 31 Agustus 2021.  
<https://www.npr.org/2021/08/19/1028472005/afghanistan-conflict-timeline>.

Dina Susanti, Farah Monika. "Peran AS dalam Transisi Rejim di Negara Lain: Studi Kasus Afghanistan." *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, 2005.

- Djalal, Hasyim. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS, 1990.
- Dorronsoro, Gilles. "Kabul at War (1992-1996): State, Ethnicity, and Social Classes ." *South Asian Multidisciplinary Academy Journal* , 2007 : 1-24.
- DZ, H. Abdul Mun'im, and Adam G. Damasky. *Diplomasi Jalur Kedua Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan*. Depok: Tosemito Foundation Press, 2018.
- Ewans, Martin. *Afghanistan: A Short History of Its People and Politics* . Afghanistan: Harper, 2002.
- Faizin, Muhammad Ijmalul. "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan pada 2011-2018." *Skripsi* , 2020: 138-146.
- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, 2016: 251-284.
- Fathoni, Ahmad. *Selesaikan Konflik, NU Afghanistan Dorong Diplomasi Islam Nusantara*. 18 Juni 2019.  
<https://www.nu.or.id/post/read/107561/selesaikan-konflik-nu-afghanistan-dorong-diplomasi-islam-nusantara>.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications, 1996.
- Irvan Aladip Mahfudin, Dwi Ardhanariswari Sundrijo. "Faith-Based Transnational Actors and Peacebuilding: An Analysis of the Role Of Nahdlatul Ulama in Afghanistan's Peace Process." *Global: Jurnal Politik Internasional*, 2021.

- Jordan, Ray. *Ulama NU & Afghanistan Rumuskan Resolusi Konflik*. 18 juli 2011.  
<https://nasional.okezone.com/read/2011/07/18/337/481055/ulama-nu-afghanistan-rumuskan-resolusi-konflik>.
- Khurun'in, Irza. "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan." *Transformasi Global* 3, no. 1 (2017): 95-114.
- Larsen, Henrik. *Misreading Afghan Ethnic Conflicts Cost Two Decades and Trillions of Dollars*. 14 Juli 2021.  
<https://thehill.com/opinion/international/562961-misreading-afghan-ethnic-conflicts-cost-two-decades-and-trillions-of/>.
- Luthfi, Kabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal." *Shahih*, 2016: Vol. 1.
- Mazrieva, Eva. *NU-Afghanistan Dorong Diplomasi "Islam Nusantara" untuk Selesaikan Konflik*. 18 Juni 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/nu-afghanistan-dorong-diplomasi-islam-nusantara-untuk-selesaikan-konflik/4962754.html>.
- Medica Mondiale*. Juni 2022. <https://medicamondiale.org/en/where-we-empower-women/our-partner-organisations> (accessed Desember 14, 2022).
- Monge. *Faith-based Diplomacy Trumping Realpolitik*. Edited by Douglas Johnston. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Mun'im, H. Abdul DZ, interview by Muhammad Asyrof Abdik. *Nahdlatul Ulama Afghanistan* (5 July 2022).
- . *Percepatan Perdamaian Afghanistan Dialog NU dengan Pemimpin Taliban*. Depok: Tosemito Foundation Press, 2019.

- Mun'im, H. Abdul DZ, and Adam G. Damasky. *Diplomasi Jalur Kedua Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan*. Depok: Tosemito Foundation Press, 2018.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan ." *Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis DPR* , 2021: 7-12.
- Purwono, Andi. "Diplomasi Kiai Nahdlatul 'Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional." *Jurnal Sosio Dialektika (JSD)*, 2020.
- Purwono, Andi. "ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia." *Jurnal Politik Profetik (JPP)*, 2013.
- Purwono, Andi. "Organisasi Kegamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia." *Jurnal Politik Profetik Vol. 2 No. 2*, 2013: 1-23.
- Ridwan, Nur Kholik. *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008.
- Sholeh, Badrus. "RESOLUSI KONFLIK DI ASIA TENGGARA: PENGALAMAN MUSLIM INDONESIA." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2017.
- Sinno, Abdulkader. *How ethnic and religious divides in Afghanistan are contributing to violence against minorities* . 25 Oktober 2021. <https://theconversation.com/how-ethnic-and-religious-divides-in-afghanistan-are-contributing-to-violence-against-minorities-168059>.
- Smith, Brandon. "Afghanistan, 1989-1996: Between the Soviet and the Taliban." *Thesis*, 2005: 1-46.



Widyaningrum, Gita Laras. *Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar, dan Osama Bin Laden*. 10 September 2018.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis-serangan-911-runtuhnya-menara-kembar-dan-osama-bin-laden?page=all>.

Wijaya, Pandasurya. *Buat yang Masih Bingung, Ini Penjelasan Sederhana Tentang Perang di Afghanistan*. 12 desember 2018.

<https://www.merdeka.com/dunia/buat-yang-masih-bingung-ini-penjelasan-sederhana-tentang-perang-di-afghanistan.html><https://www.merdeka.com/dunia/buat-yang-masih-bingung-ini-penjelasan-sederhana-tentang-perang-di-afghanistan.html>.

WILPF Afghanistan, Section. *Facebook*. 2022.

<https://www.facebook.com/WILPFAFGGROU> (accessed Desember 14, 2022).